

## **LAMPIRAN**

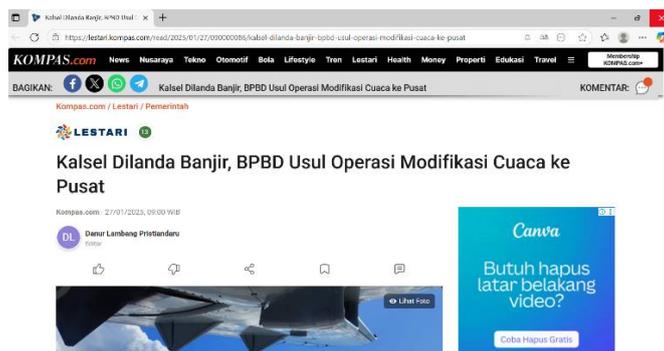
## Lampiran 1. Artikel Berita Media Kompas.com

1. 27 Januari 2025

**Judul :** Kalsel Dilanda Banjir, BPBD Usul Operasi Modifikasi Cuaca ke Pusat

**Link :**

<https://lestari.kompas.com/read/2025/01/27/090000086/kalsel-dilanda-banjir-bpbd-usul-operasi-modifikasi-cuaca-ke-pusat>



KOMPAS.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi (BPBD) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengusulkan operasi modifikasi cuaca (OMC) ke pusat. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengurangi curah hujan yang melanda provinsi itu guna mencegah bencana banjir yang melanda sejumlah kabupaten atau kota. "Berdasarkan prakiraan BMKG, hujan masih membasahi Provinsi Kalsel hingga April 2025," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel Bambang Dedy Mulyadi di Banjarbaru, sebagaimana dilansir Antara, Minggu (26/1/2025). Dia menjelaskan, dengan curah hujan yang memiliki rentang waktu cukup lama seperti ini, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah nyata terutama peningkatan mitigasi. "Sehingga kami mempertimbangkan penting mengusulkan OMC agar segera dilakukan di langit Kalsel sebagai solusi tepat mitigasi bencana banjir," ujar Bambang. Menurut Bambang, OMC menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung upaya mitigasi bencana di musim penghujan, terutama untuk mengurangi potensi terjadinya bencana hidrometeorologi. Ia berharap pemerintah pusat mengabulkan usulan OMC di Kalsel sehingga memberikan manfaat besar bagi pengurangan risiko bencana banjir. Berdasarkan data Bidang Pusdalops BPBD Kalsel, curah hujan sejak 1-25 Januari 2025 telah menyebabkan banjir di berbagai wilayah. Dari bencana tersebut, jumlah warga yang terdampak sebanyak 24.618 KK atau 68.072 jiwa, sedangkan rumah yang terendam 21.673 unit rumah. Bambang menyampaikan, hujan dengan intensitas sedang dan tinggi selama satu bulan terakhir ini terjadi hampir merata di wilayah Kalsel. Dalam menangani banjir dan bencana alam lainnya, BPBD Kalsel telah melakukan mitigasi secara struktural yaitu membangun sarana fisik dengan kegiatan antara lain pembangunan bendungan, tabat, tanggul normalisasi

sungai, serta sarana fisik lain. Sedangkan mitigasi non-struktural melalui kebijakan dan regulasi, salah satunya dengan penguatan regulasi dokumen kebencanaan, yakni dokumen peta kerawanan bencana, Kajian Risiko Bencana Nasional 2022-2026, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2025- 2029, Rencana Kontingensi Banjir 2025- 2027. Selain itu, dokumen Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan 2025- 2027, Rencana Kontingensi Bencana Longsor 2025 -2027, dan Rencana Kontigensi Bencana Karhutla Tahun 2025-2027. Gubernur Kalsel Muhidin telah menginstruksikan jajarannya untuk proaktif membantu masyarakat yang terdampak banjir selama periode Januari.

2. 21 Januari 2025

**Judul :** Jakarta Banjir, DPRD Usul Anggaran Penanganan Banjir Dievaluasi

**Link :**

<https://megapolitan.kompas.com/read/2025/01/31/17053051/jakarta-banjir-dprd-usul-anggaran-penanganan-banjir-dievaluasi>



JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin mengatakan, pihaknya akan mengusulkan evaluasi anggaran dan regulasi penanganan banjir ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta). Usulan evaluasi ini disampaikan menyusul banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta sejak Selasa (28/1/2025) kemarin. “Kita mengevaluasi anggaran, kedua kita evaluasi regulasi. Apa sih yang menjadi hambatan dinas terkait itu untuk bisa menyelesaikan banjir secepatnya?” ujar Khoirudin saat ditemui Kompas.com, Jumat (31/1/2025). Selain itu, DPRD Jakarta juga berencana meminta Pemerintah Provinsi Jakarta menetapkan Key Performance Index (KPI) bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov. KPI ini akan menjadi tolok ukur kinerja, terutama bagi dinas yang berperan dalam mitigasi bencana, seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA). “Misalnya SDA. Sekarang ada berapa titik banjir? Setelah satu tahun dia bertugas, dikasih anggaran, berapa titik banjir yang terselesaikan, yang turun?” ungkap dia. Dengan adanya KPI, pengukuran kinerja setiap SKPD akan lebih terarah dan berbasis hasil nyata. Jika target tidak tercapai,

rekomendasi untuk mengganti pejabat terkait harus dipertimbangkan. “Kalau dia tidak tercapai, ganti. Rekomendasi kita ganti,” ucap Khoirudin. Meski demikian, Khoirudin menyadari bahwa DPRD hanya bisa memberikan rekomendasi. Keputusan akhir terkait pengangkatan atau pemberhentian kepala SKPD sepenuhnya berada di tangan Gubernur Jakarta. “Namun kewenangannya ada di eksekutif. Kita hanya sebatas tupoksi dewan,” ucap Khoirudin.

3. 31 Januari 2025

**Judul :** Banjir kotanya, Sengsara warganya...

**Link :** <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/01/31/06240311/banjir-kotanya-sengsara-warganya>



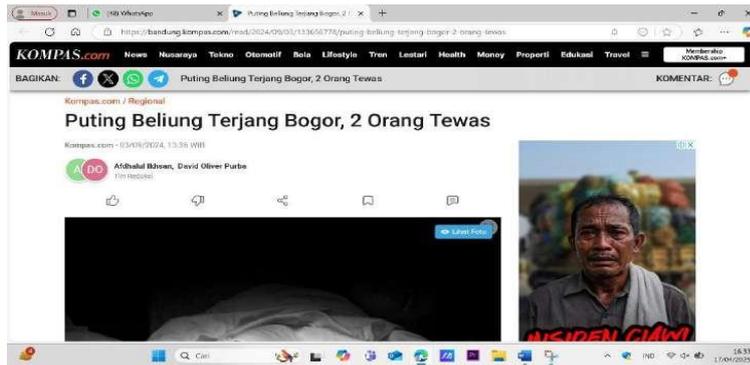
JAKARTA, KOMPAS.com – Banjir di Jakarta belum ada obatnya. Begitu hujan deras mengguyur, warga langsung dibuat sengsara. Sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir selama tiga hari terakhir, sejak Selasa (28/1/2025) hingga Kamis sore. Air bukan hanya masuk ke permukiman warga, melainkan juga menutup ruas-ruas jalan utama. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 30 hingga 100 sentimeter yang membuat aktivitas warga terganggu. Pada Rabu pagi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta mencatat ada 52 RT yang terdampak banjir, dengan 22 ruas jalan yang ikut tergenang. Jakarta Barat menjadi wilayah yang paling banyak terdampak, dengan 27 RT yang terendam air. Namun, menjelang malam sekitar pukul 22.00 WIB, beberapa wilayah mulai surut. Hingga Kamis pagi, BPBD melaporkan masih ada 36 RT dan 4 ruas jalan yang belum terbebas dari banjir. Jakarta Barat tetap menjadi daerah paling terdampak, dengan 21 RT yang masih terendam. Warga merana karena banjir Banjir yang tidak kunjung usai membuat warga semakin sengsara. Mereka yang bekerja dan mencari nafkah ikut terdampak. Seorang pengemudi ojek online, Rio (23), mengaku terjebak banjir di Jalan Boulevard Utara, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selama sembilan jam sejak Rabu dini hari. "Saya sih dari jam 2 malam di sini menunggu banjir surut," ujar Rio kepada Kompas.com, Rabu. Rio tak bisa pulang ke rumahnya di Tanah Merah, Jakarta Utara, karena seluruh akses jalan tergenang air. "Enggak ada (jalan lain), semua kekepung banjir aksesnya, dari Plumpang juga banjir," keluhnya. Hal serupa dialami Into (33), pedagang tahu keliling yang biasa berdagang di Jalan Boulevard Utara. Akibat banjir, ia

kehilangan banyak pelanggan. "Saya pembelinya jadi surut juga. Sepi," ujar Into. Biasanya, Into bisa menjual tahu dengan lancar di kawasan tersebut. Namun sejak pagi, ia hanya mendapat segelintir pembeli karena sepi orang yang lewat. "Kalau banjir, enggak ada pembeli, harus nunggu surut," tambah Into. Drainase tak bisa tampung air Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, beralasan bahwa banjir terjadi akibat hujan ekstrem yang melanda Kota Jakarta. "Kami juga mengacu pada prakiraan cuaca yang ada, bahwasanya yang kemarin itu prakiraan adalah hujan sedang-lebat. Namun ternyata, petang sampai dengan malam kemarin itu adalah cuaca ekstrem," ujar Teguh, Rabu. Teguh mengeklaim, pihaknya telah menginstruksikan jajaran Pemprov Jakarta untuk menangani banjir sebaik mungkin, termasuk menyiapkan pompa air dan melakukan pengecekan saluran. "Kita menyiagakan apa yang semua bisa kita lakukan. Dalam artian begini, seperti pompa air, kami siagakan semuanya. Kemudian kami lakukan pengecekan saluran air semuanya," katanya. Namun, ia mengakui kapasitas drainase Jakarta tak mampu menampung hujan dengan intensitas tinggi. "Jadi malam itu cuacanya ekstrem. Tercatat di stasiun pengamatan hujan Kemayoran, ketinggian (air) 368 milimeter, padahal kemampuan kita 150 milimeter. Kemudian untuk yang terendah adalah 264 milimeter ini di stasiun pengamatan hujan Cengkareng," jelas Teguh. Meski demikian, Teguh mengklaim penanganan banjir di Jakarta sudah lebih baik karena air cepat surut. Tak ada lagi program pengendalian banjir Pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menilai pengendalian banjir di Jakarta sudah tak lagi sesuai dengan kondisi kota saat ini. Menurutnya, sedimentasi, penyempitan saluran, pendangkalan, dan limbah menjadi penyebab utama banjir, ditambah kebiasaan warga yang masih membuang sampah sembarangan. Ia juga menyoroti kurangnya program pengerukan dan pembersihan saluran air dalam beberapa tahun terakhir. "Dua tahun terakhir tidak pernah terdengar ada program yang namanya pengerukan, pembersihan selokan," kata Yayat. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan era Ahok yang memiliki tim pemantau saluran air setiap hari. "Saat zaman Ahok, dia punya pasukan atau petugas yang setiap hari update tentang pemeriksaan saluran," ujarnya. Banjir di Jakarta memang belum ada obatnya. Setiap hujan besar datang, warga hanya bisa pasrah, menunggu air surut sambil berharap perbaikan segera dilakukan.

4. 04 September 2024

**Judul :** Putting Beliung Terjang Bogor, 2 Orang Tewas

**Link :** <https://bandung.kompas.com/read/2024/09/03/133656778/puting-beliung-terjang-bogor-2-orang-tewas>



BOGOR, KOMPAS.com - Puting beliung menerjang Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/9/2024) petang. Peristiwa itu mengakibatkan enam orang terluka, di mana dua di antaranya tewas karena tertimpa tembok bangunan. Staf Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Jalaludin, mengatakan, peristiwa itu terjadi setelah hujan yang disertai angin kencang melanda Kabupaten Bogor pada pukul 18.00 WIB. "Total korban enam orang, yaitu dua meninggal dunia dan empat luka-luka," kata Jalal lewat keterangan tertulis, Selasa (3/9/2024). Jalal mengatakan, keenam korban merupakan pekerja bangunan dari Jawa Timur. Saat itu, mereka sedang membuat gudang kolam ikan hias. Namun, tiba-tiba gudang yang akan dibuat untuk usaha ikan hias, roboh akibat diterjang puting beliung. Bangunan yang roboh menimpa para korban yang sedang berteduh. Empat korban selamat, yakni Suyoto (37), Iman Gojali (45), Tofik (40), Wiwaluyo (45). Sementara, dua korban meninggal dunia adalah Pendi (45) dan Wanto (40), warga Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kini, bangunan gudang tempat ikan hias tidak dapat dipergunakan kembali karena rusak. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati ke lokasi. "Situasi akhir, untuk saat ini korban luka dibawa ke RSUD Leuwiliang untuk mendapatkan perawatan. Kemudian korban yang meninggal dunia langsung dibawa ke kampung halamannya menggunakan dua unit ambulans untuk selanjutnya dimakamkan," kata Jalal.

5. 06 November 2024

**Judul :** Tanah Longsor, Jalan Penghubung Bogor-Tangerang Terputus

**Link :**

<https://regional.kompas.com/read/2024/11/06/115216978/tanah-longsor-jalan-penghubung-bogor-tangerang-terputus>

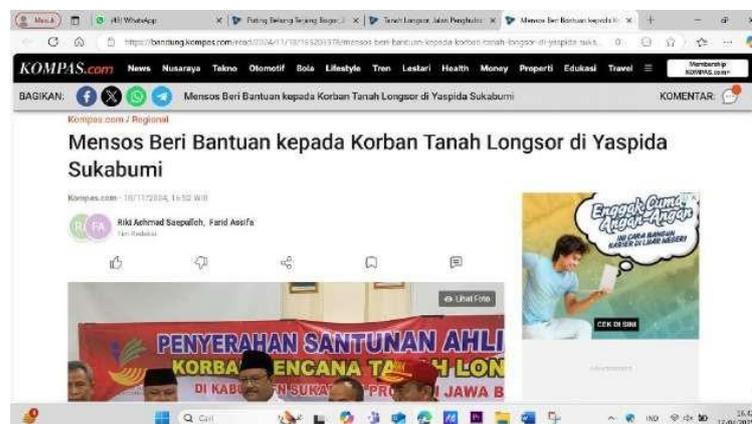


BOGOR, KOMPAS.com - Jalan penghubung Kabupaten Bogor dan Tangerang terputus akibat longsor pada Selasa (5/11/2024) sore. Kini, jalan penghubung desa tersebut tidak bisa dilewati kendaraan. "Jalan di Desa Karang Tengah terputus akibat longsor di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat melalui keterangan tertulisnya, Rabu (6/11/2024). Ujat mengatakan, longsor terjadi karena hujan lebat yang melanda wilayah itu sejak Selasa siang. Dari assesmen anggota di lokasi, peristiwa longsor terjadi Selasa sekitar pukul 16.50 WIB. Beruntung tidak ada rumah warga yang terdampak sehingga tidak ada korban jiwa. "Namun longsor sepanjang kurang lebih 40 meter dengan kedalaman 7 meter ini mengakibatkan putusnya jalan desa di Kampung Ranca Haur, Desa Karang Tengah, Pagedangan, Kabupaten Tangerang menghubungkan Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor," ungkapnya. "Bencana longsor diduga akibat guyuran hujan yang lebat sejak Selasa siang hingga sore," imbuhnya.

6. 18 November 2024

**Judul :** Mensos Beri Bantuan kepada Korban Tanah Longsor di Yaspida Sukabumi

**Link :** <https://bandung.kompas.com/read/2024/11/18/165203578/mensos-beri-bantuan-kepada-korban-tanah-longsor-di-yaspida-sukabumi>



SUKABUMI, KOMPAS.com - Menteri Sosial Syaifullah Yusuf memberikan bantuan kepada para korban bencana longsor di Yaspida, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Senin (15/11/2024). Gus Ipul, sapaan akrab Syaifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia sebagai respons cepat terhadap bencana. “Ini yang kita lakukan selama ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar ketika ada bencana kita bisa memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan kewenangan kita,” kata Gus Ipul kepada awak media di Yaspida, Kabupaten Sukabumi. Bantuan yang disalurkan mencakup uang tunai sebesar Rp 85 juta untuk korban bencana tanah longsor. Selain itu, Kementerian Sosial juga memberikan logistik tanggap darurat senilai Rp 193.780.000, perlengkapan sekolah sebanyak 500 pcs senilai Rp 100 juta, dan paket sembako dengan total nilai Rp 2.700.000. Bencana tanah longsor tersebut terjadi di kompleks pesantren Yaspida yang berlokasi di Jalan Parungseah, Desa Cipetir, Kecamatan Kadudampit, pada Rabu (13/11/2024) sekitar pukul 22:00 WIB. Akibat kejadian ini, empat orang dilaporkan meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka.

7. 07 Oktober 2024

**Judul :** Kebakaran Hutan Batasi Kemampuan Tanah Serap Karbo

**Link :** <https://lestari.kompas.com/read/2024/10/07/195800486/kebakaran-hutan-batasi-kemampuan-tanah-serap-karbon>



KOMPAS.com - Target ambisius Perjanjian Paris untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius nampaknya belum berbuah manis. Buktinya, dampak pemanasan global salah satunya kebakaran hutan makin sering terjadi yang akhirnya merugikan planet ini juga. Dalam studi baru yang dipublikasikan di Nature Geoscience, peneliti menemukan kebakaran hutan yang sering terjadi itu bisa menyebabkan kemampuan tanah untuk menyerap karbon makin sedikit. Kesimpulan ini didapatkan setelah peneliti melakukan simulasi iklim yang digunakan untuk menentukan target Perjanjian Paris. Seperti dikutip dari Phys, Senin (7/10/2024) peneliti menemukan tingkat pemanasan global saat kebakaran mulai memengaruhi kemampuan tanah untuk menyerap karbon adalah 1,07 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri. Peneliti memperkirakan dengan adanya kebakaran, kemampuan tanah menyerap karbon akan berkurang hingga 5 persen atau 25 gigaton CO<sub>2</sub>. Sementara jika ingin membatasi pemanasan 1,5 derajat Celsius atau di bawah 2 derajat

Celsius, perlu penyerapan karbon sebesar 64 gigaton CO<sub>2</sub>. Membatasi pemanasan hingga 1,5°C tetap penting dilakukan untuk menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim. Namun dalam banyak kasus, kita sudah melihat perubahan signifikan pada ekosistem Bumi saat ini. Peningkatan Pemanasan Permukaan Tanah Pemanasan global telah menyebabkan kebakaran menjadi lebih sering terjadi. Beberapa wilayah seperti AS bagian barat dan Spanyol bagian timur mengalami peristiwa kebakaran yang luasnya dua atau tiga kali lipat dalam beberapa dekade terakhir. Kebakaran hutan yang lebih besar biasanya mengakibatkan hilangnya vegetasi yang lebih besar. Namun selain itu menurut analisis data satelit selama lebih dari satu dekade, peningkatan frekuensi dan keparahan kebakaran hutan dapat meningkatkan pemanasan permukaan tanah. Ini berarti bahwa permukaan tanah memanaskan dengan melepaskan lebih sedikit air dan menyerap lebih banyak radiasi yang masuk daripada tahun-tahun sebelumnya.

8. 06 Januari 2025

**Judul :** Alasan Yogyakarta Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, sampai Kapan?

**Link :** <https://yogyakarta.kompas.com/read/2025/01/06/190331678/alasan-yogyakarta-perpanjang-status-siaga-darurat-bencana>



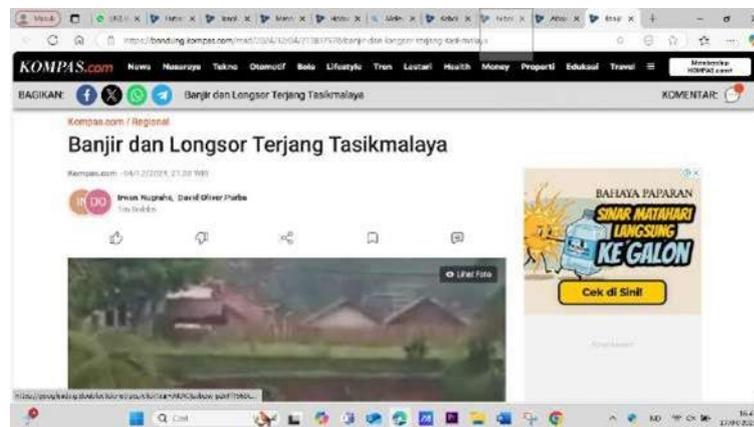
YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperpanjang status siaga darurat bencana hidrometeorologi hingga 3 Februari 2025. Keputusan ini diambil menyusul prediksi curah hujan yang masih tinggi hingga Mei 2025. Perpanjangan status tersebut tertuang dalam SK Gubernur DIY Nomor 504/KEP/2024 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, yang mencakup bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Noviar Rahmad, menyampaikan bahwa status siaga darurat sebelumnya akan berakhir pada 2 Januari 2025. "Berakhir di 2 Januari 2025, terus kita perpanjang dari 3 Januari sampai 3 Februari 2025," ujarnya, Senin (6/1/2025). Noviar menambahkan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi bencana longsor, banjir, dan cuaca ekstrem yang masih tinggi. "Kondisi curah hujan cukup tinggi itu masih akan berlangsung

sampai bulan Mei," katanya. Alasan perpanjangan status siaga darurat DIY Perpanjangan status siaga darurat ini juga dipicu oleh adanya bibit siklon tropis 98S yang dapat memicu gelombang tinggi di Samudra Hindia selatan Jawa Timur dan Bali. BPBD DIY mencatat sejak Oktober 2024, terdapat 377 titik longsor yang tersebar di lima kabupaten/kota, yaitu Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman, Bantul, dan sebagian kecil Kota Yogyakarta. Selain itu, BPBD DIY juga mencatat 262 kejadian cuaca ekstrem dan 27 kejadian banjir selama tahun 2024. Sebagai langkah antisipasi, Noviar menyatakan bahwa BPBD DIY telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, baik secara struktural maupun non-struktural. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pendistribusian bronjong atau kawat penahan talud ke kelurahan-kelurahan yang rawan longsor. "Kita membantu penyediaan angkong, linggis, cangkul, serta sekop, dan juga permakanan," ujarnya. Ia juga mengimbau masyarakat di wilayah rawan longsor, khususnya di Kulon Progo, untuk selalu memperhatikan informasi terkini dari BMKG. "Selalu update dari BMKG terkait dengan situasi cuaca yang dikeluarkan per 2 jam sekali," pungkas Noviar.

9. 04 Desember 2024

**Judul :** Banjir dan Longsor Terjang Tasikmalaya

**Link :** <https://bandung.kompas.com/read/2024/12/04/213837578/banjir-dan-longsor-terjang-tasikmalaya>



TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Hujan deras mengguyur Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, tanpa henti sejak siang hingga malam pada Rabu (4/12/2024). Akibatnya, beberapa bencana seperti banjir, longsor, dan rumah roboh terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Bencana yang melanda di beberapa lokasi, tidak sampai menimbulkan korban jiwa. "Kami mencatat ada tiga titik lokasi bencana di Kabupaten Tasikmalaya akibat cuaca buruk hari ini. Banjir lintasan di Kecamatan Sukaresik dan Jamanis. Kalau longsor dan rumah roboh di Sukahening, Ciawi, dan Jamanis," jelas Ketua Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Tasikmalaya, Jembar Adisetya, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu malam. "Kalau rumah roboh di Kecamatan Sukaraja, kami sudah datang untuk bantuan evakuasi barang-barang pemilik rumah," kata Jembar. Di Kecamatan Sukahening, bencana longsor sering terjadi akibat kontur tanah yang labil, terutama di

wilayah pesawahan dan pegunungan. Longsor kali ini terjadi di areal tebing pesawahan, yang letaknya cukup jauh dari pemukiman warga. "Untuk longsor Sukahening dikategorikan sering terjadi, namun dampak terbanyak menimpa lahan pertanian," kata Jembar. Sementara itu, banjir di Kecamatan Sukaresik selalu terjadi jika hujan deras mengguyur, akibat luapan Sungai Cikidang dan anak Sungai Citanduy. Namun, kali ini ketinggian banjir tergolong kecil, sehingga belum ada evakuasi khusus bagi warga sekitar. Banjir skala kecil juga terjadi di wilayah Jamanis akibat luapan saluran irigasi di daerah tersebut. "Kami masih terus berkoordinasi dan mendata. Apakah layak mendapatkan bantuan tanggap darurat atau tidak, semuanya masih dalam proses pendataan di lapangan," ungkap Jembar. Jembar menambahkan bahwa hujan disertai angin melanda Tasikmalaya sejak Selasa (3/12/2024) hingga Rabu (4/12/2024) malam. Hujan masih terus berlangsung meski intensitasnya tidak terlalu deras dan tidak merata di seluruh wilayah Tasikmalaya.

10. 29 Desember 2024

**Judul :** Banjir dan Longsor di Bima:1 Rumah Ambruk, 410 Terendam

**Link :** <https://regional.kompas.com/read/2024/12/29/110123678/banjir-dan-longsor-di-bima-1-rumah-ambruk-410-terendam>



BIMA, KOMPAS.com - Bencana banjir dan tanah longsor kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu malam (28/12/2024). Kejadian ini mengakibatkan satu rumah di Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, ambruk tertimpa material longsor. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bima, Isyrah menjelaskan, longsor terjadi sekitar pukul 20.00 WITA akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak sore hingga pukul 19.00 WITA. "Ada longsor tanggul di Desa Doridungga yang mengakibatkan satu rumah tertimbun," ungkapnya saat dikonfirmasi, Minggu (29/12/2024). Meskipun tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam insiden ini, rumah yang tertimpa longsor rusak berat akibat material batu dan tanah. Pemilik rumah saat ini terpaksa mengungsi di salah satu rumah warga di Desa Doridungga. "Kondisi saat ini air sudah surut dan warga yang mengalami kerusakan rumah mengungsi di rumah tetangga," tambah Isyrah. Selain longsor di Desa Doridungga, curah hujan tinggi juga menyebabkan banjir di area permukiman warga di Desa Jia, Kecamatan Sape, dan

Desa Tonda, Kecamatan Madapangga. Dari hasil pendataan awal, tercatat 410 rumah warga terendam air dengan ketinggian antara 30 hingga 50 sentimeter. Isyrah mengimbau kepada warga untuk tetap waspada dan memantau informasi perkembangan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). "Perlu mewaspadaai adanya potensi terjadi hujan dan angin kencang, khususnya pada periode peralihan musim seperti sekarang ini," tutupnya.

## Lampiran 2. Artikel Berita Media Mongabay.co.id

1. 08 Februari 2025

**Judul :** Banjir Jakarta dan Sekitar, Tata Ruang Buruk?

**Link :** <https://www.mongabay.co.id/2025/02/08/banjir-jakarta-dan-sekitar-tata-ruang-buruk/>



Banjir menggenangi beberapa daerah di Jakarta, Tangerang, Bekasi, maupun Bogor (Jabodetabek), sejak akhir Januari hingga saat ini. Dari pemukiman di pesisir sampai tengah kota bahkan Bandara Cengkareng, Tangerang, Banten, pun sempat tergenang. Pemerintah menyebut, banjir terjadi karena intensitas hujan tinggi. Berbagai kalangan seperti pegiat lingkungan menilai, banjir parah terjadi karena tata ruang buruk hingga pembangunan amburadul, dan dampak krisis iklim. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada 29 Januari 2025, di Jakarta ada 35 RT dan 19 ruas jalan di Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur, alami banjir dengan ketinggian 30-100 sentimeter. Untuk menanggulangi dampak banjir atau bencana hidrometeorologi basah, pemerintah melakukan upaya modifikasi cuaca. Michael Sitanggang, Ketua Subkelompok Logistik dan Peralatan BPBD Jakarta mengklaim upaya ini berhasil. Modifikasi cuaca di Jakarta, katanya, mengurangi curah hujan sampai 60%. Di Tangerang, Banten, banjir sampai menggenangi jalanan bahkan Bandara Cengkareng. Kawasan pesisir Banten pun tak luput dari banjir hujan maupun rob. Di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, misal. Kawasan pesisir itu ini banjir dengan ketinggian sekitar 100 sentimeter. Pantauan *Mongabay*, banjir itu melanda pemukiman dan akses jalan kendaraan. Jalan yang banjir itu masih bisa terakses dengan kendaraan, namun harus berhati-hati. Sejumlah warga terlihat memanfaatkan perahu untuk berlalu-lintas. Lewat

pemantauan pakai drone, terlihat sebagian Desa Kohod terendam air berwarna cokelat. Ada pula yang tak banjir. Aktivitas pembangunan pun terlihat jelas, sebagian Desa Kohod rata dengan tanah dan lalu lalang truk besar karena ada pembangunan. Ada juga jalan raya beraspal dan papan besar bertuliskan Kota Bagan. Kota Bagan ini merupakan proyek perluasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Dalam situs resmi, Kota Bagan atau Kampoeng Bagan PIK 2 bertemakan suasana di kawasan bagan Sumatera Utara. Di lokasi ini, akan ada perumahan dengan nuansa tematik kota bagan modern beserta fasilitasnya. Harga pengembang tawarkan untuk rumah dan ruko di Kampoeng Bagan Rp2,2 miliar-Rp 3,3 miliar. Berdasarkan denah lokasi, Kampoeng Bagan berada di Desa Kohod. Kota Bagan tidak terkena banjir. Warga menyebut, selama ada pembangunan itu, desa terkena banjir bisa berhari-hari. Hilir sungai daerah ini di Desa Alar Tengah sudah teruruk, ketika hutan pun mudah banjir, “Hilir sungai ini dikeruk karena lahan sudah dibeli (pengembang) di Alar Tengah (desa),” kata Deden, nama samaran, Januari lalu. Deden bilang, banjir kian parah ketika aliran sungai terurug tanah. “Itu sekarang *udah* jadi jalan (dulu tanah warga),” katanya. Puluhan warga juga unjuk rasa di Kota Bagan, ketika banjir melanda desa. Mereka mendatangi pekerja dan meminta pengembang membuka kembali akses aliran sungai menuju laut. Relokasi kebanjiran. Rumah-rumah warga relokasi proyek PIK 2 pun kebanjiran di Kampung Alar Tengah, Desa Kohod. Ina, bukan nama sebenarnya, alami banjir sampai satu meter. Sebelumnya, dia tinggal di Kampung Tanjung Burung, masih Desa Kohod, tetapi tak pernah kebanjiran. Rumah Ina beserta keluarga masuk area perluasan PIK 2 jadi Kota Bagan. Dia pun kena relokasi. Di tempat relokasi baru di Kampung Alar Tengah, dia malah kebanjiran. Rumah-rumah relokasi itu masih tahap pembangunan, belum 100% rampung. “Ini sebelumnya (tempat relokasi) sawah yang diurug, terus jadi tempat relokasi,” katanya. Dia bilang, baru saja ingin memindahkan perabotan rumah ke tempat baru, namun sudah kena banjir. Ina sempat protes ke aparat Desa Kohod tetapi tak mendapat respon. Nasi sudah menjadi bubur, dia sudah menyerahkan sertifikat rumah dan mendapat ganti rugi bangunan serta menerima relokasi lahan. Dia hanya bisa pasrah. “Ini banjirnya parah *banget*. Kami *gak papa* direlokasi, tapi *tolong* kasih fasilitas bagus, yang sesuai, yang aman dan tidak banjir.” Dalam upaya pembebasan lahan, pengembang menerapkan metode relokasi atau tukar guling lahan. Pengembang hanya membeli bangunan warga, lahan tukar dengan yang telah disediakan, tak jauh dari lokasi warga sebelumnya. “Tapi kita belum dapat sertifikatnya. Jadi lahan yang kita tempatkan sekarang belum ada sertifikatnya, janjinya akan diberikan,” katanya. Dia pun berharap, pemerintah melihat penderitaan warga ini. “Semoga pemerintah *ngeliat nih*. Tempat relokasi kami banjir.” Tak jauh dari lokasi banjir, ada pagar laut yang tengah jadi sorotan publik, berjarak sekitar satu kilometer menuju laut. *Mongabay* menghubungi Arsin, Kepala Desa Kohod, namun tak ada respon. *Mongabay* juga mendatangi rumah Arsin di Kampung Tanjung Burung, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, namun dia tak ada. Budi Muhdini, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang bilang, banjir karena curah hujan tinggi. “Karena alur air sungai yang terlalu besar dengan curah hujan tinggi ditambah juga air kiriman air itu bisa keluar,” katanya kepada *Mongabay*. Bersamaan dengan itu, sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang juga banjir, seperti pada enam kampung di Kecamatan Pakuhaji, tiga desa di

Kecamatan Sepatan, satu desa di Kecamatan Gunung Kaler. “Mitigasi kita di lapangan kita melatih diri dan anggota keluarga dari masyarakat apabila terjadi banjir dan memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar seperti itu, memberikan edukasi,” katanya. Kondisi serupa Kohod juga terjadi di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluknaga. *Mongabay* pun mendatangi lokasi dan banjir mencapai 150 sentimeter. Desa ini bersebelahan dengan proyek perumahan PIK 2. Posisi tanah PIK 2 lebih tinggi satu meter dari pemukiman warga. Begitu pula di Kampung Dadap, Kecamatan Kosambi. Banjir membuat kawasan itu kumuh dan banyak bangunan kosong yang sudah penghuni tinggalkan. Banjir terjadi karena rob dan hujan. Tanggul untuk menghalangi rob tak mampu menahan air laut memasuki pemukiman. Banjir Jabodetabek. Selain di kawasan pesisir, sejumlah daerah di Kota Tangerang juga banjir. Setidaknya, ada 26 kawasan di 13 kecamatan Kota Tangerang jadi titik rawan banjir. Untuk mengatasi itu, pemerintah melakukan upaya normalisasi guna memastikan kelancaran aliran air di sejumlah drainase selama hujan deras melanda Kota Tangerang dalam beberapa hari terakhir. “Kami menemukan banyak saluran air tersumbat sampah. Upaya normalisasi drainase di sejumlah wilayah rawan banjir di Kota Tangerang,” kata Taufik Syahzaeni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang dalam keterangan, akhir Januari lalu. Saat ini, katanya, Pemerintah Kota Tangerang fokus upaya normalisasi drainase di sejumlah titik lokasi yang terindikasi tersumbat volume sampah dalam jumlah besar. Sedangkan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), terdapat 16 titik rawan banjir. Jumlah ini diklaim menurun bila dibandingkan pada 2024 48 titik rawan banjir. Dalam penanganan banjir, Pemerintah Kota Tangsel bakal lakukan perbaikan drainase, pemasangan *long storage* dan tandon. Banjir juga melanda perbatasan Jalan Benda Barat 3 dan Gang Alief di Cipayung, Kota Depok, 1 Februari 2025, dengan ketinggian air sekitar 90 sentimeter. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, angin kencang menerjang dua desa di dua kecamatan, Megamendung dan Caringin pada 28 Januari lalu. Sedangkan di Kabupaten Bekasi, 52 wilayah terdampak banjir periode 28 Januari-2 Februari 2025. Tata ruang buruk dan krisis iklim. Dwi Sawung, Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur Eksekutif Nasional Walhi mengatakan, sebagian besar banjir di Jabodetabek imbas dari tata ruang buruk. Proyek pembangunan serampangan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan juga jadi penyebab. Dia contohkan, proyek PIK 2 seperti di Desa Kohod dan Tanjung Burung. Banjir makin parah karena pengurukan tanah hingga lahan pengembang lebih tinggi. Daerah resapan air juga hilang. Belum lagi, pengembang membuat saluran irigasi bermuara ke irigasi pemukiman warga dan merusak ekosistem mangrove sebagai benteng penghalang abrasi. “Dulu, sebagian daerah resapan air *gitu*, tiba-tiba *ditimbun, ditinggiin*. Ya *udah* jadi banjir *gitu*.” Seharusnya, pemerintah mengambil sikap karena warga menderita. Pengembang, kata Sawung, seharusnya menjamin hak warga lokal untuk hidup nyaman meskipun ada proyek pembangunan. Keadaan yang terjadi malah sebaliknya. “Pemerintah justru membela pengembang, Membiarkan lahan mangrove dibabat, padahal itu *kan* seharusnya dilindungi,” katanya. Ketidaksiharian tata ruang, kata Sawung, terjadi hampir di seluruh Jabodetabek, apalagi Jakarta. Misal, irigasi berubah jadi pemukiman namun tidak ada kolam retensi sebagai pengganti. “Perbaikan tata ruang dan tata kolam air di Jabodetabek harus dilakukan.” Jeanny Sirait, Juru Kampanye Urban

Justice dari Greenpeace Indonesia mengatakan, data Badan Pusat Statistik (BPS), banjir di Jabodetabek meningkat 1-2% dalam 20 tahun. Dia sepakat, klaim pemerintah yang menyebut banjir karena curah hujan ekstrem. Dalam 20 tahun terakhir intensitas hujan juga alami peningkatan. Namun, katanya, perlu ingat bahwa tata ruang dan sistem penyerapan air di Jabodetabek juga buruk. Dia bilang, sekitar 51,2% banjir di Jakarta karena wilayah serapan minim. “Selama 20 tahun terakhir wilayah serapan di Jabodetabek buruk,” katanya. Jeanny bilang, intensitas hujan mengalami peningkatan karena krisis iklim yang menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global ini terjadi karena aktivitas industri ekstraktif yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan lapisan ozon. Krisis iklim, katanya, berdampak pula pada meningkatnya muka air laut. Tak heran, pesisir di Jabodetabek mengalami abrasi dan banjir rob. “Jadi, istilahnya, *double kill*, banjir karena hujan dan banjir karena muka air laut yang naik,” katanya. Jeanny bilang, upaya modifikasi cuaca pemerintah tak efektif mengurangi intensitas hujan. Modifikasi cuaca, katanya, hanya solusi sementara. Solusi terbaik mengatasi banjir adalah dengan memperbaiki tata ruang dan melaksanakan pembangunan yang adil. Kemudian, mengatasi krisis iklim dengan transisi energi.

2. 20 Februari 2025

**Judul :** Banjir Berulang di Sulsel, Krisis Ekologi Kian Parah?

**Link :** <https://www.mongabay.co.id/2025/02/20/banjir-berulang-di-sulsel-krisis-ekologi-kian-parah/>



Hujan lebat dan angin kencang kembali melanda Sulawesi Selatan (Sulsel), menyebabkan banjir dan longsor di berbagai wilayah Rabu (12/2/25). Maros, Makassar, dan Gowa, paling terdampak. Ribuan warga terpaksa mengungsi karena bencana ini. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maros menyebut, sekitar 4.000 keluarga terdampak banjir tersebar di 14 kecamatan. Di Makassar, lebih 2.164 jiwa terdampak. Di Gowa juga mencatat enam kecamatan terdampak cuaca ekstrem kali ini. Tim SAR gabungan turun ke berbagai titik terdampak di Makassar dan Maros untuk evakuasi korban. Kondisi jalan sulit hingga upaya tak mudah. Dua korban yang sebelumnya dilaporkan hilang di Maros dalam kondisi tak bernyawa. Daeng Mading (60), warga Dusun Pampangan, Desa Abulo Sibatang, ditemukan 500 meter dari lokasi hilangnya. Alif (19),

warga Kecamatan Turikale, ketemu 100 meter dari titik terakhir terlihat. Slamet Riadi, Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik Walhi Sulsel, mengatakan, banjir bukan sekadar fenomena alam tetapi mengindikasikan krisis ekologi makin parah. Catatan Walhi, dalam satu dekade terakhir, bencana di Sulsel meningkat drastis. Pada 2014, bencana tercatat ‘hanya’ 54 kejadian, pada 2024, melonjak hingga 362 kejadian! Akhir 2024, Kota Makassar banjir karena hujan deras terus-menerus. Banjir menyebabkan 1.969 jiwa dari 515 keluarga mengungsi di 28 titik. Empat kecamatan yang terdampak paling parah adalah Manggala, Biringkanaya, Panakkukang, dan Tamalanrea. Kerugian akibat bencana 2024 capai Rp1,95 triliun!. “Provinsi ini mengalami penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang sangat signifikan. Salah satu indikatornya adalah luas tutupan hutan yang tersisa hanya 1.359.039 hektare atau sekitar 29,70% dari total luas wilayah Sulsel. Ini membuat Sulsel masuk kategori kritis,” ujar Slamet, Sabtu (15/2/25). Alih fungsi hutan dan lahan Menurut kajian Walhi, berkurangnya tutupan hutan di Sulsel terpicu beberapa faktor utama, seperti masifnya pertambangan, alih fungsi lahan, penebangan liar, dan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Hilangnya hutan besar-besaran berdampak langsung pada kondisi daerah aliran sungai (DAS) wilayah ini. “Dari 139 DAS di Sulsel, hanya 38 masuk kategori sehat karena masih memiliki tutupan hutan lebih 30%. Sisanya, 101 DAS atau 72,6%, dalam kondisi kritis.” Selain tutupan hutan berkurang, faktor lain adalah eksploitasi sumber daya alam tak terkendali. Pertambangan, baik legal maupun ilegal, merusak fungsi hulu sebagai penyerap air. Aktivitas ini berkontribusi pada erosi tanah, yang akhirnya meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di berbagai tempat. Alih fungsi lahan menjadi perkebunan skala besar juga berkontribusi. Menurut Walhi, banyak kawasan hutan berubah jadi kebun sawit. Dampaknya, keanekaragaman hayati menurun dan mengurangi kapasitas ekosistem dalam menyerap air hujan. “DAS Maros dan DAS Tallo menjadi contoh nyata. Drainase buruk dan berkurangnya tutupan hutan membuat air tidak bisa terserap dengan baik. Di DAS Maros, misal, dalam 30 tahun terakhir luas hutannya telah menyusut hingga 1.057,90 hektar dari 70.860 hektar,” kata Slamet. Dampak dari krisis ekologi ini pun makin masyarakat yang tinggal di sekitar daerah rawan bencana rasakan. Mereka harus menghadapi ancaman kehilangan tempat tinggal, kerusakan infrastruktur, hingga hilangnya mata pencaharian akibat bencana yang terus berulang. Di beberapa wilayah, masyarakat terpaksa mengungsi ke tempat aman. Namun, fasilitas pengungsian minim dan bantuan logistik yang terbatas membuat kondisi mereka makin sulit. Kondisi ini menunjukkan, pemerintah masih kurang sigap dalam menghadapi bencana yang sebenarnya bisa diprediksi. Walhi Sulsel menekankan, pencegahan dan penanganan bencana di provinsi ini harus holistik, dengan pendekatan berbasis bentang alam. Pendekatan berfokus wilayah administratif dia nilai tak relevan mengingat keterkaitan ekosistem antar-daerah. “Tiap daerah tidak bisa hanya bertanggung jawab atas wilayahnya sendiri. Pemerintah perlu merumuskan strategi pencegahan dan penanganan bencana yang melibatkan berbagai daerah dalam satu kesatuan ekosistem. Kolaborasi antar-daerah mutlak diperlukan.”. Walhi juga mendesak, pemerintah memonitoring dan evaluasi ketat aktivitas industri yang merusak lingkungan. “Pertambangan dan pembangunan infrastruktur yang mengorbankan lingkungan harus ditindak tegas. Jika tidak, bencana akan terus meningkat, dan masyarakat jadi korban,” kata Slamet.

Rizal Pauzi, dosen kebijakan publik dari Universitas Hasanuddin sepakat dengan pernyataan Walhi. Menurut dia, banjir dan bencana berulang di Sulsel, khusus Kota Makassar, bukan sekadar karena intensitas curah hujan tinggi tetapi menunjukkan desain pembangunan kurang tepat. Dia contohkan pada penggunaan ruang, seperti izin perumahan dan pembukaan tambang di lokasi zona banjir. “Perlu evaluasi komprehensif terkait penggunaan ruang ini, sebagai landasan untuk perbaikan ke depan,” katanya. Tak kalah penting, katanya, transparansi dan akuntabilitas publik terkait penyebab banjir. Selama ini, pemerintah kurang terbuka mengenai penyebab bencana yang kian marak terjadi. “Kita tidak boleh membiarkan ketidakpedulian terhadap masalah ini, karena semua pihak harus terlibat dalam penanganan banjir ini,” katanya. Dia mendorong, Pemerintah Sulsel menerbitkan kebijakan turunan dari UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yang berkaitan dengan pengaturan pertambangan, hutan dan laut. Dengan begitu, upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif. “Termasuk mekanisme perizinan yang harus memperhatikan keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan.”

3. 03 Februari 2025

**Judul :** Pejabat Rawan Lemahkan Komitmen Perjanjian Paris Banjir Kritik

**Link :** <https://www.mongabay.co.id/2025/02/03/pejabat-rawan-lemahkan-komitmen-perjanjian-paris-banjir-kritik/>



Pernyataan para pejabat Indonesia menuai kontroversi. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, Indonesia tidak terjebak dalam skenario kesepakatan iklim Perjanjian Paris atau Paris Agreement terkait transisi energi. Ucapan senada juga muncul dari Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Bidang Iklim dan Energi. Pernyataan mereka ini muncul tak lama setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, resmi menarik negaranya dari perjanjian itu pada 27 Januari 2025. Sontak, berbagai kalangan mengkritik keras pernyataan mereka. Hadir dalam acara di stasiun televisi, Bahlil menyoroti sikap Amerika Serikat yang sebelumnya jadi pelopor Paris Agreement, justru menarik diri dari perjanjian itu. “Saya juga bingung. Presiden Amerika baru terpilih langsung mundur dari Paris Agreement. Padahal dia salah satu yang memelopori. Karena itu, kita jangan terjebak,” kata Bahlil. Sejauh ini, Indonesia masih

berkomitmen terhadap aksi iklim global. Namun, Bahlil bilang, bila transisi energi tidak akan buru-buru. Energi fosil, terutama batubara, masih perlu untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Presiden Prabowo, katanya, memintanya mendorong kemandirian energi. Bukan mengganti semua basis energi ke energi terbarukan. Tanpa dana internasional, Indonesia enggan mempercepat transisi energi dan menghentikan operasional PLTU. Pernyataan tak jauh beda disampaikan Hashim Djojohadikusumo dalam acara ESG Sustainable Forum 2025 yang dipantau secara daring, 31 Januari lalu. Hashim membandingkan emisi karbon antara Amerika Serikat dan Indonesia. Amerika Serikat, katanya, menghasilkan sekitar 13 ton karbon per kapita per tahun, sedangkan Indonesia ‘hanya’ 3 ton. “Kalau AS tidak mau menuruti perjanjian internasional (Paris Agreement), kenapa negara seperti Indonesia harus mematuhi? Ini adalah masalah keadilan. Indonesia 3 ton, AS 13 ton, tapi Indonesia yang disuruh menutup pusat-pusat tenaga listrik berbasis fosil. Rasa keadilannya di mana?” Indonesia rentan terdampak krisis iklim. Berbagai kalangan pun sontak mengkritik pernyataan dua pejabat yang dinilai memberi sinyalemen untuk mengikuti jejak Amerika Serikat itu. Iqbal Damanik, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menyebut, pernyataan kedua pejabat ini sebagai sesat pikir. “Trump itu seorang *climate crisis denier*, dia menolak krisis iklim benar-benar terjadi. Masalahnya, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat rentan terhadap dampak krisis iklim, seperti banjir, kebakaran hutan, dan bencana hidrometeorologi. Saya tidak tahu Bahlil lupa atau pura-pura tidak tahu,” kritik Iqbal. Merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang 2023, tercatat 5.400 bencana hidrometeorologi terjadi di Indonesia. Jumlah ini, katanya, meningkat 38,39% dibanding tahun sebelumnya. Dia bilang, pernyataan Bahlil dan Hashim mencederai komitmen Indonesia dalam upaya menurunkan emisi dan program bursa karbon yang baru pemerintah luncurkan, sekalipun program ini juga dinilai problematik. Pemerintah, sebetulnya punya cukup infrastruktur untuk mengatasi krisis iklim. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahkan punya direktorat khusus mengatasi perubahan iklim. Di sektor energi juga Indonesia layak untuk menjual penyerapan karbon karena sudah membangun beberapa pembangkit energi terbarukan. Selain itu, kalau Indonesia keluar dari Paris Agreement, dapat merusak integritas negara dalam perjanjian internasional, bahkan mengganggu hubungan dengan negara-negara yang selama ini memberikan pendanaan untuk aksi iklim, seperti Norwegia, Kanada, dan Uni Eropa. “Indonesia punya dua jalur komitmen emisi, upaya sendiri dan bantuan luar negeri. Kalau kita keluar dari Paris Agreement, mana ada negara-negara seperti Norwegia, Kanada, atau Uni Eropa yang mau membantu kita? Ini bisa berdampak pada pendanaan aksi iklim, bahkan merusak hubungan luar negeri kita.” Iqbal menyebut, pernyataan Bahlil dan Hashim semakin mengukuhkan bahwa pemerintahan Prabowo adalah rezim ekstraktif yang lebih mementingkan eksploitasi sumber daya alam ketimbang keberlanjutan lingkungan. Padahal, sebagai negara yang paling rentan, Indonesia harusnya lebih serius menangani dampak perubahan iklim. Novita Indri, Juru kampanye energi fosil dari Trend Asia menyampaikan kritikan serupa. Menurut dia, pernyataan kedua pejabat itu menunjukkan minimnya pemahaman pemerintah akan urgensi mengatasi krisis iklim. “Seharusnya, Bahlil menyadari betapa anti-sains dan kontroversial langkah Trump saat menarik AS

dari Perjanjian Paris. Jangan malah meniru dan terjebak dalam *race to the bottom*. Ini seharusnya mendorong kita untuk meningkatkan mitigasi dan adaptasi, bukan mundur.” Dua pekan sebelum keputusan mundur dari Perjanjian Paris, AS dilanda kebakaran terbesar dalam sejarahnya, dengan 57.635 hektar. Seharusnya, peristiwa itu bisa dipahami bahwa dampak krisis iklim bukan mitos. Sebagai negara kepulauan tropis, kata Novi, jauh lebih rentan terhadap bencana dampak krisis iklim, seperti badai, banjir, kekeringan, hingga krisis pangan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa selama Januari 2025, Indonesia mengalami 165 banjir, 13 cuaca ekstrem, dan 18 tanah longsor. Sebanyak 635.336 jiwa terdampak dan terpaksa mengungsi. Semua bencana ini memiliki korelasi erat dengan krisis iklim yang makin memburuk. Pendanaan alternatif. Mundurnya AS dari Perjanjian Paris memang berpotensi melemahkan komitmen global terhadap pendanaan transisi energi, termasuk bagi negara berkembang seperti Indonesia. Namun, menurut Novita, hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah dekarbonisasi. “Sedari awal, pendanaan JETP memang buram dan lebih banyak berbasis utang, yang berpotensi membebani Indonesia. Justru kita harus mencari sumber pendanaan alternatif dari dalam negeri,” ujar Novita. Salah satu sumber yang diusulkan adalah peningkatan pungutan produksi batubara. Produksi batubara Indonesia pada 2024 mencapai lebih dari 833 juta ton dan diperkirakan melebihi 900 juta ton pada tahun-tahun mendatang. Potensi penerimaan negara dari peningkatan pungutan produksi batu bara bisa mencapai \$23,58 miliar per tahun—angka yang lebih besar dari komitmen JETP. Novita juga menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh bergantung pada kepemimpinan AS dalam isu transisi energi. Justru, hilangnya kepemimpinan AS membuka peluang bagi negara lain untuk mengambil peran lebih besar dalam kolaborasi iklim global. “Perjanjian Paris bukan sekadar dokumen teknis tentang emisi, tetapi komitmen global untuk menyelamatkan umat manusia dari dampak krisis iklim. Mundur dari perjanjian ini adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan.” Direktur Eksekutif TuK Indonesia, Linda Rosalina, menyebut pernyataan kedua pejabat serampangan dan menyesatkan. Kendati Indonesia menghasilkan emisi karbon lebih rendah dibandingkan AS, bukan berarti dampak krisis iklim bisa diabaikan begitu saja. “Ini adalah masalah global yang mempengaruhi masa depan kita semua.” Linda bilang, krisis iklim telah berdampak nyata pada produktivitas pertanian Indonesia, terutama tanaman pangan yang semakin terancam oleh cuaca ekstrem dan bencana alam. “Jika Menteri ESDM menyepelekan hal ini, artinya ia tidak memikirkan dan tidak mendukung rencana Presiden dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.” Bhima Yudistira, Direktur Eksekutif Celios, mengakui, keluarnya AS dari kesepakatan Paris akan berdampak signifikan terhadap pendanaan transisi energi di Indonesia. Program Just Energy Transition Partnership (JETP) terancam tidak berjalan mulus, atau bahkan bubar. Dia katakan, Indonesia sedang membutuhkan dana besar, terutama dari internasional untuk membangun 71 gigawatt pembangkit energi terbarukan dan mempercepat pensiun PLTU batubara. Dengan kata lain, keluarnya AS akan menjadikan Indonesia kehilangan salah satu donor terbesarnya dalam program ini. Bhima menyarankan Indonesia untuk mencari pendanaan potensial lain untuk membiayai transisi energi, misalnya ke Timur Tengah. “Timur Tengah terbukti membantu pembangunan PLTS di Waduk

Cirata yang skalanya cukup besar dan akan diekspansi. Jadi mencari partner baru selain AS dan China juga sangat mendesak, dan Timur Tengah jadi salah satu pilihannya.” Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, pernyataan Hasyim yang menyebut JETP gagal tak akurat, keliru dan tidak berdasar data. Hal yang harus dipahami, kata IESR, pendanaan JETP tidak diberikan dalam bentuk bantuan tunai, melainkan melalui berbagai skema dari masing-masing negara IPG (International Partnership Group). Antara lain, hibah, bantuan teknis (*technical assistance/TA*), ekuitas, atau pembiayaan proyek. Hingga 2024, berdasar data IESR, total \$230 juta telah dikucurkan pendonor IPG dalam bentuk hibah dan TA pada 44 program. Sedangkan sekitar \$97 juta untuk 11 program masih dalam proses persetujuan. Selain itu, ada juga USD1 miliar dalam bentuk ekuitas dan pinjaman di 8 proyek dan sebagainya. Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa meminta pemerintah tak gamang melakukan transisi energi. Menurutnya, kesepakatan JETP tidak bersandar pada AS semata lantaran IPG terdiri dari banyak negara dan lembaga pendanaan internasional. “Transisi energi adalah prasyarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, seperti diamanatkan dalam RPJPN 2025-2045 dan merupakan satu dari 13 transformasi super prioritas yang dilakukan pemerintah,” kata Fabby dalam rilisnya. Dia menilai, mempertahankan energi fosil dan tetap mengoperasikan PLTU batubara berisiko menjadikan Indonesia ‘bunuh diri ekonomi’. “Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk menurunkan emisi, menekan biaya penyediaan energi, serta mengurangi subsidi karena mengabaikan kesempatan membangun pembangkit energi terbarukan dengan skala yang lebih besar.” Kajian IESR menyebut, penghematan dari subsidi listrik dan biaya kesehatan diperkirakan mencapai US\$34,8 miliar dan US\$61,3 miliar. Penghematan tersebut 2-4 kali lipat dibanding dengan potensi kerugian akibat aset mangkrak, biaya penghentian pembangkit, transisi pekerja, serta kerugian penerimaan negara dari batubara.

4. 19 Oktober 2024

**Judul :** Pulau Buton Dilanda Puting Beliung Dahsyat Akibat Gelombang Panas

**Link :** <https://www.mongabay.co.id/2024/10/19/pulau-buton-dilanda-puting-beliung-dahsyat-akibat-gelombang-panas/>



Langit cerah dengan awan mendung agak tebal berwarna abu-abu gelap menyebar di beberapa sudut langit Desa Bahari III, desa terujung di pesisir Buton Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra). Ketika itu, udara terasa panas hingga masuk ke dalam rumah-rumah warga, pada awal Oktober lalu. Risman (35), baru saja tiba di rumahnya dan masuk ke dalam ruang tamu– menyandarkan badannya di kursi untuk istirahat sejenak. “Angin gemuruh tiba-tiba terdengar, saya keluar rumah melihat orang-orang berhamburan keluar rumah,” kata Risman. Matanya terbelalak, nyaris tidak percaya dengan apa yang dia saksikan. Dua angin puting beliung mendadak bersamaan muncul dari dua arah yang berbeda; dari balik bukit karang terjal cadas yang memagari bentangan pesisir dan dari awan cumulonimbus yang berada di laut. Puting beliung yang berhembus dengan kecepatan tinggi turun ke kaki bukit batuan karang melintasi kompleks Sekolah Satu Atap (SATAP) yang berada tepat di kaki bukit membuat anak Sekolah Dasar (SD) ketakutan, mereka lari keluar dari kelas untuk pulang ke rumah masing-masing. Angin itu terus menyusuri kampung dan memporak-porandakan dua atap rumah warga. Sementara yang datang dari laut dalam hitungan detik melayangkan bangunan atap masjid dan jatuh tepat di atas badan kapal yang sedang dikerjakan, berjarak selemparan batu dari masjid. Beruntung, para kuli pekerja kapal selamat, segera berpencar meninggalkan pekerjaan mereka, menyelamatkan diri ketempat yang aman. “Angin puting beliung bermain-main sekitar tiga menit. Semua orang panik,” ucapnya, yang menyempatkan diri merekam situasi perkampungan yang diterjang puting beliung. Dua puting beliung yang katanya ‘membabi-buta’ itu kemudian bertemu dan menyatu di tengah kampung dan sesaat mendadak hilang kemudian. Pemerintah Desa Bahari III mendata puting beliung merusak bangunan tiga rumah dan satu bangunan masjid yang berjarak puluhan meter dari rumah Risman. Dua tahun sebelumnya, puting beliung juga terjadi di periode Oktober, merusak atap bangunan perumahan guru dan menerbangkan atap dua bangunan SATAP. Ketika itu, wilayah yang berada di ujung kaki Sulawesi ini sedang menghadapi kemarau panjang akibat badai El Nino yang mempengaruhi perubahan cuaca pesisir–laut setempat. Risman memprediksi, puting beliung terjadi akibat perubahan iklim dan terjadi di setiap musim panas berlangsung. Risman mengurungkan niatnya untuk turun melaut untuk memancing ikan di perairan dangkal terdekat, dia khawatir cuaca buruk akan berulang di hari yang sama. Katanya, fenomena puting beliung dadakan ini diluar prediksi aplikasi BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) yang kerap digunakan para nelayan untuk mengetahui prediksi cuaca. Suhu panas meningkat. Mengenai puting beliung yang melanda wilayah Buton Selatan, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun BMKG di Kendari, Faizal Habibie, mengakui bahwa fenomena itu tidak terdeteksi oleh satelit dan radar cuaca BMKG. “Kami belum (tidak) melihat dari satelit dan radar cuaca adanya pembentukan awan cumulonimbus di daerah tersebut,” ungkapnya. Habibie menjelaskan jika suhu permukaan air laut yang hangat di perairan Sulawesi Tenggara memengaruhi peningkatan–pembentukan awan hujan di sebagian wilayah Sulawesi Tenggara. Pantauan BMKG, karakteristik suhu udara berdasarkan data 20 tahun terakhir (2004 – 2023) menunjukkan bahwa suhu udara rata rata sekitar 26 -28°C. Dan sedari awal tahun ini, suhu udara rata-rata bulanan lebih tinggi dari rata rata 20 tahun terakhir dengan peningkatan 0.2 – 0.5°C. Satelit BMKG mencatat dinamika atmosfer terkini menunjukkan faktor lokal sangat dominan dalam mempengaruhi pola cuaca, di

samping itu suhu permukaan air laut yang hangat di wilayah perairan Sulawesi Tenggara mempengaruhi peningkatan pembentukan awan hujan. Katanya Habibie, meskipun fenomena La Nina bersifat lemah di periode Oktober ini, masyarakat tetap perlu mewaspada potensi bencana pada musim peralihan ke musim hujan seperti banjir, banjir bandang, angin kencang, puting beliung, guntur, dan bencana alam lainnya. Biasanya, musim peralihan tersebut mempunyai karakter cuaca yaitu pada siang dan sore hari terjadi peningkatan pembentukan awan konvektif yang berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur dan angin kencang. Tasman, Kepala Desa Bahari III, juga merasa heran beberapa saat setelah puting beliung berlalu, terjadi hujan deras selama tiga jam. “Cuma waktu itu saja hujan parah di tengah musim panas,” ucapnya. Dia sangat mengkhawatirkan sebagian warganya yang bekerja sebagai nelayan sedang turun melaut ketika itu. Dia mengimbau warganya yang sehari-hari menjadi nelayan tangkap tuna dan ikan karang dasar untuk tetap waspada dan tetap pantau aplikasi pemberitahuan cuaca (BMKG). Tasman tidak pernah mengerti penyebab setiap kali puting beliung datang melanda wilayahnya menasar area yang sama, yaitu di titik RT 6.

5. 28 September 2024

**Judul :** Tambang Emas Ilegal di Solok Longsor, Belasan Orang Tewas

**Link :** <https://mongabay.co.id/2024/09/28/tambang-emas-ilegal-di-solok-longsor-belasan-orang-tewas/>



Belasan penambang emas ilegal tewas tertimbun longsor galian tambang di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis (26/9/24). Longsor dipicu hujan intensitas tinggi dan struktur tanah labil. Sampai Sabtu (28/9/24) pukul 12.00 WIB, total 12 orang meninggal dunia, dua masih dalam pencarian, dan 11 orang selamat. Sebelumnya, sempat dilaporkan ada 15 korban jiwa. “Kesalahan komunikasi akibat sulitnya jaringan di lokasi kejadian yang merupakan area *blank spot*, hingga informasi awal tidak sepenuhnya akurat,” kata Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam rilis kepada media. Irwan Efendi, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Solok mengatakan, laporan sementara ada 43 orang korban. Dari jumlah itu 25 orang masih tertimbun, 15 orang tewas dan tiga luka-luka. Karena akses jalan sulit, katanya, pencarian baru bisa pada Jumat (26/9/24) pukul 3.00 dini hari. Pencarian petugas dan masyarakat dengan peralatan seadanya. “Tidak dapat diakses roda empat,” katanya. Perjalanan menuju lokasi

hanya bisa berjalan kaki sekitar 8 jam dari pusat nagari atau bisa ditempuh dengan sepeda motor. Dinas Kesehatan sudah mengirim tujuh unit ambulan ke lokasi untuk membantu evakuasi. Muhari mengatakan, tim gabungan terdiri dari BPBD Kabupaten Solok, Basarnas, TNI, Polri, PMI, serta masyarakat masih terus lakukan pencarian dan evakuasi. Lebih 100 personel terlibat dalam operasi ini. BNPB mengimbau, masyarakat selalu waspada terhadap kondisi cuaca ekstrem dan potensi bencana lain di kawasan rawan longsor. “Hentikan seluruh aktivitas penambangan ilegal yang sangat berisiko terhadap keselamatan. Longsor tambang ilegal tidak hanya terjadi kali ini dan di tempat ini saja. Penegakan hukum harus tegas agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masa depan.” AKBP Muari, Kapolres Solok mengatakan, lokasi longsor merupakan tambang emas ilegal lama yang dipakai kembali. Polres sudah sempat razia dua kali dan tidak ditemukan orang di sana. “Pernah, kami dua kali. Setiap kami razia, alat *ga* ada, orangnya *ga* ada, kami hanya datang udah *nggak* ada,” katanya dihubungi via telepon, Jumat (27/9/24). Dia bilang, kemungkinan awalnya di tambang ini gunakan alat berat. “Baru tiga hari ditinggal penambang lama, (datang penambang baru) bawa linggis dan alat-alat,” katanya. Wengki Purwanto, Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Barat mengatakan, pemerintah gagal membangun ekonomi berkelanjutan masyarakat karena penambangan seperti ini dibiarkan berulang-ulang. “Karena kesulitan hidup masyarakat jadi tameng seolah-olah pemerintah daerah dan aparat dilematis saat akan menindaknya,” katanya. Untuk tragedi ini, katanya, pemerintah baik kabupaten dan provinsi serta penegak hukum harus bertanggung jawab. “Jangan sampai hanya masyarakat kecil yang digiring mereka salah. Jangan sampai narasi yang berkembang justru menambah duka bagi keluarga korban dan pemerintah melupakan akar persoalannya.” Aktivitas tambang ilegal ini, katanya, mudah diketahui dan tidak perlu pakai ilmu penyidikan mendalam. Mereka gunakan alat berat, perlu pasokan bahan bakar minyak (BBM). “Perlu proses memasukkan alat berat dan BBM. *Kan* tidak sembunyi-sembunyi dan terang benderang. Itu sudah diketahui sejak lama oleh pemerintah.” Tambang emas ilegal ini, katanya, tidak hanya di Solok, ada juga di Pasaman Barat. “Orang mesti demo mendesak aparat penegak hukum pemerintah menghentikan aktivitas tambang ilegal karena khawatir menyebabkan banjir longsor atau korban jiwa,” katanya. Wengki menilai, pemerintah belum menganggap tambang ilegal ini serius. Meskipun sudah memberikan dampak buruk seperti banjir di pesisir selatan tetapi tidak ada tindak lanjut.

6. 05 Februari 2025

**Judul :** Belajar dari Longsor Pekalongan, Mitigasi dan Adaptasi Minim?

**Link :** [https://www.mongabay.co.id/2025/02/05/belajar-dari-longsor-pekalongan-mitigasi- dan-adaptasi-minim/](https://www.mongabay.co.id/2025/02/05/belajar-dari-longsor-pekalongan-mitigasi-dan-adaptasi-minim/)



Banjir dan longsor melanda Desa Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah (Jateng) setelah hujan lebat mengguyur, 20 Januari lalu. Dari bencana itu, 25 orang meninggal dunia, dan belasan luka-luka. Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, tim SAR sempat kesulitan evakuasi karena jalur terputus. Apalagi harus memutar melalui Banjarnegara menuju lokasi. Jalur terhalang karena longsor. Bergas Caturisasi Penanggulangan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, mengatakan, selain korban jiwa, hal itu juga menyebabkan dua rumah dan rusaknya jembatan berat. Tiga mobil, satu bangunan kafe serta tiga akses jalan tertutup longsor. Data BPBD Jateng mencatat, selain di Pekalongan, banjir juga terjadi di sejumlah tempat, seperti, Brebes, Pematang, Kota dan Tegal, Kendal, Grobogan, Demak, Banjarnegara, dan Sragen. Peristiwa ini menyebabkan ribuan rumah dan hektar lahan pertanian terendam dan ratusan fasilitas umum terdampak. Pemerintah Pekalongan menerapkan status tanggap darurat selama 14 hari, 21 Januari-4 Februari 2025. Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan menyebut, ada 11 kecamatan dari hulu hingga hilir terdampak longsor dan banjir bandang ini. Terparah ada di Kecamatan Petungkriyono. Terkait kerusakan sejumlah infrastruktur, bupati mengupayakan segera perbaikan. “Kami berupaya secepatnya melakukan perbaikan dengan [pos] dana tak terduga agar ekonomi bisa segera jalan,” katanya, dikutip dari laman pemerintah setempat. Bagaimana mitigasi dan adaptasi? Data Kajian Risiko Bencana Nasional Jateng BNPB 2022-2026, menyebutkan tingginya risiko longsor di Jateng. Secara keseluruhan, risiko longsor 1.020.772 hektar, termasuk, di Pekalongan seluas 45.237 hektar. Kajian berdasarkan pada sejumlah parameter, seperti gangguan kestabilan daerah lereng, curah hujan, kejadian gerakan tanah, dan getaran, kemiringan lereng, tipe batuan, jarak daerah patahan atau sesar aktif. Masih dalam kajian yang sama, selain faktor cuaca dan fisiografi penyebab terjadinya tanah longsor, juga ada beberapa faktor pemicu lainnya. Mengkonversi konversi lahan dan penggundulan hutan. Penataan pertanian yang salah juga turut berkontribusi. Misal, lahan pertanian di lereng gunung, tumpukan sampah tak terolah yang berisiko longsor karena tekanan dan hujan air dengan intensitas tinggi. Eko Teguh Paripurno, Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta benarkan, kalau Kecamatan Petungkriyono rawan longsor. Ia terlihat dari kemiringan, kondisi geologi, ketebalan tanah, dan kepadatan aliran udara. “Ditambah faktor tata guna lahan, curah hujan dan faktor kegempaan. Kawasan tersebut memiliki

kerawanan longsor yang tinggi.” ET, sapaan Eko mengatakan, secara geologi, struktur tanah di lokasi dominan batuan vulkanik yang sudah lapuk dengan kemiringan 40 derajat (52%). “Jadi, di antara lembah-lembah, ada material lepasnya. Sementara sebagian besar batuan lapuknya.” Karena kondisi batuan lapuk, kepadatan aliran air cenderung tinggi dan rapat. Sedang, daya resap rendah. “Intensitas hujan tinggi, kecenderungan batuan lapuk meningkatkan kemudahan longsor,” katanya. Dalam situasi itu, mitigasi saja tidak cukup untuk menekan korban. Mitigasi, kata ET, harus pula dengan upaya adaptasi. Dia sebutkan, sekitar tiga tahun lalu, longsor juga terjadi di sana, tak ada korban jiwa karena tak ada bangunan di lokasi itu. Berbeda saat ini, sudah berdiri kedai kopi. Saat kejadian, puluhan orang sedang mengadakan acara keluarga. Yang lain memanfaatkan lokasi itu untuk berteduh. Kendati pun coffeeshop tidak begitu dekat dengan tebing tetapi material longsor yang ambrol mampu menjangkau dan meratakannya. Dalam situasi ini, sangat penting bagi masyarakat di daerah rawan untuk membaca ‘tanda’. Mereka bisa mengambil tindakan sigap ketika terjadi bencana. jadi, perlu meningkatkan kembali kemampuan masyarakat untuk mengeluarkan pengungsi mandiri, dan merespons ancaman. Sistem peringatan dini yang tak berjalan maksimal juta turut mendorong banyak korban. Pada daratan longsor di Pekalongan, misal, korban yang jatuh seharusnya bisa tertekan jika sistem peringatan dini bahwa longsor dan banjir bandang berisiko terjadi saat hujan lebat-berjalan baik.

7. 21 Agustus 2024

**Judul :** Kebakaran Hutan Banyak untuk Pembukaan Lahan?

**Link :** <https://www.mongabay.co.id/2024/08/21/kebakaran-hutan-dan-lahan-karena-pembukaan-lahan/>



Kebakaran hutan dan lahan masih terus menghantui Indonesia. Kajian Auriga mencatat, ada 6,1 juta hektar lahan terbakar di Indonesia selama 2013-2023, sebanyak 55% terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Jumlah ini meningkat jadi 10 juta hektar kalau menghitung kebakaran berulang di area sama. Kebakaran di lokasi baru seluas 3,7 juta hektar, ada 2,3 juta hektar lahan terbakar berulang kali, mulai dari dua sampai 11 kali. Sesilia Maharani Putri, peneliti Yayasan Auriga Nusantara mengatakan, lokasi-lokasi baru ini, harus ditelisik lebih lanjut. Beberapa wilayah, seperti di

Sumatera Selatan, misal, kedapatan ditanami sawit setelah kebakaran terjadi. Dari kajian itu, katanya, sebagian besar kebakaran di wilayah dengan tutupan alami. “Besarnya kebakaran di wilayah dengan penutupan alami mengindikasikan kebakaran untuk pembukaan lahan atau telah menjadi habitual alami yang terjadi di wilayah itu seperti savana Bali-Nusra,” katanya saat peluncuran platform MapBiomass Fire di Jakarta, 7 Agustus lalu. Mapbiomas merupakan platform yang tersedia secara daring dan bebas diakses publik untuk memperlihatkan histori kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia sejak 2013. Di dalamnya, juga ada analisis periode langganan kebakaran dalam satu tahun kalender. Karhutla untuk pembukaan lahan dikonfirmasi Safrul Yunardy, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem di Dinas Kehutanan Sumatera Selatan yang hadir secara daring. Meskipun tak menyebutkan rinci, dari analisis Songket Sumsel, *platform* pemantau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Pemerintah Sumsel, ditemukan lahan terbakar 2015 dan 2019 sudah ditanami sawit pada 2023. “Dengan analisis lanjutan, kita bisa dapatkan siapa pelaku pembakaran di masa lalu ini,” katanya, seraya bilang, perlu integrasi dan kolaborasi semua data. Sebelumnya, Pantau Gambut juga menyimpulkan hal sama. Kajian mereka menemukan lahan kebakaran di restorasi gambut banyak ditumbuhi tanaman monokultur seperti sawit dan akasia. Dari data mereka, 57% gambut kawasan lindung di lokasi restorasi pemerintah berubah menjadi sawit setelah terbakar. Lahan restorasi di perusahaan 48% berubah menjadi tanaman monokultur. Beberapa kawasan restorasi juga mengalami kebakaran, termasuk di area perusahaan. Salah satunya, PT Bumi Mekar Hijau di Sumatera Selatan yang selalu terbakar setiap tahun. Selain itu, perusahaan lain seperti PT Mayawana Persada di Kalimantan Barat pun mengalami kebakaran pada 2023. “Kami belum lakukan pemantauan kebakaran 2024, tapi di perusahaan-perusahaan yang kami jadikan *sample* penelitian, ada sekitar setengah juta lahan terbakar tahun 2023,” kata Juma Maulana, GIS Specialist Pantau Gambut. Masih rawan Temuan Pantau Gambut senada dengan hasil analisis MapBiomass Fire yang menunjukkan lahan gambut masih jadi penyebab kebakaran. Setidaknya, ada 35,8% dari luas 6,1 juta hektar terbakar sepanjang 11 tahun terakhir terjadi di kawasan gambut. Musim panas berpadu dengan El-Nino membuat lahan ini rawan terbakar dan sulit padam. Kondisi ini diamini Safrul yang menyebut sebagian besar area terbakar terjadi di lahan gambut. Dari data yang dia paparkan, terdapat 1,2 juta hektar lahan gambut di Bumi Sriwijaya. Mayoritas gambut fungsi budidaya. “Ini yang jadi masalah ketika El-Nino. Karena area terbakar di Sumsel memang lahan gambut,” ucap Safrul. Parahnya, kebakaran gambut sangat berdampak ke masyarakat. Catatan Safrul, desa-desa dengan penduduk miskin tinggi terdapat di lahan gambut, mulai dari Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Musi Rawas. Daerah ini pula yang mengalami kebakaran cukup luas dan parah pada 2021, 2022 dan 2023. “Ketika kebakaran yang tidak miskin jadi miskin, yang miskin makin miskin.” Hal ini dipicu berbagai kerugian harus mereka tanggung seperti kehilangan pekerjaan, aset, kebun, dan biaya tambahan untuk berobat karena penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut dan sakit mata saat kebakaran. Untuk itu, dari analisis mereka, masyarakat jadi pihak paling dirugikan ketika kebakaran dengan persentase mencapai 59%, perusahaan 27% dan pemerintah hanya 14%. Lola Abas, Koordinator Nasional Pantau Gambut, menyebut, 16,9 juta dari 24,2 juta hektar kawasan hidrologis gambut di

Indonesia rentan terbakar. Tahun lalu, lebih 450.000 hektar lahan gambut terbakar. “Terbesar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan,” katanya. Parahnya, lahan gambut terbakar selama 2015-2020 jadi perkebunan monokultur, terutama sawit. “Hanya 1% saja jadi hutan alami.” Anomali Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, anomali pada 2023. Kala itu, kebakaran hutan dan lahan jadi bencana terbanyak selama satu tahun, mengalahkan banjir dan longsor yang biasa selalu mendominasi. Kejadian ini, dianggap anomali lantaran El-Nino tahun lalu masih tergolong moderat. Pada tahun dengan El-Nino tinggi biasa justru didominasi banjir dan longsor. “Tahun 2015 saat El-Nino *peak* itu longsor dan banjir yang paling banyak kebakaran,” kata Abdul Muhari, Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB dalam forum sama. Sedang ketika La-Nina, karhutla menjadi bencana kedua yang paling sering terjadi. “Ketika puncak musim hujan Februari, kita mengarahkan perhatian ke Aceh. Karena sisi barat banjir bandang dan longsor, di timur justru *forest fire*.” Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University juga menyoroti kebakaran 2023. Menurut informasi yang dia dapat, emisi 2023, lebih besar dari 2015 karena banyak lahan gambut terbakar. “Penting melakukan pencegahan dengan serius,” katanya. Salah satunya, dengan melihat periode langganan kebakaran. Analisis MapBiomas Fire menunjukkan 77% kebakaran terjadi pada Agustus sampai November. “Tapi ingat, terkadang Juni pun sudah kebakaran dan sulit diatasi.”

8. 11 Januari 2025

**Judul :** Hidrometeorologi, Bencana yang Sering Melanda Indonesia

**Link :** <https://www.mongabay.co.id/2025/01/11/hidrometeorologi-bencana-yang-sering-melanda-indonesia/>



Wilayah Indonesia akan mengalami bencana hidrometeorologi. Ini ditandai dengan hujan intensitas tinggi, angin kencang, puting beliung, banjir, tanah longsor, kekeringan, ombak tinggi, dan abrasi. Peneliti senior dari Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Amien Widodo, menuturkan bencana hidrometeorologi disebabkan oleh perubahan iklim. Saat ini, memasuki hidrometeorologi basah karena musim penghujan. Sejak tahun 1.800 hingga sekarang, hidrometeorologi merupakan bencana yang banyak

terjadi di Indonesia, disusul aktivitas geologi seperti gempa bumi dan gunung meletus. “Hampir 90-95 persen itu bencana hidrometeorologi. Sisanya sekitar 5-10 persen itu gempa dan erupsi gunung berapi,” kata Amien, Selasa (7/1/2025). Cuaca ekstrem ini meningkatkan dampak yang ditimbulkan, sehingga memiliki daya rusak. Misal, angin kencang yang sering terjadi tidak hanya merobohkan pohon tetapi juga menghancurkan bangunan. “Pengaruh La Nina Moderat dari Samudra Pasifik yang menambah sekitar 20 persen curah hujan yang turun.” Adaptasi dan mitigasi perlu dilakukan masyarakat, agar mengetahui potensi bencana yang dapat terjadi di daerahnya. Amien menyontohkan kasus banjir di Surabaya, Jawa Timur, akhir tahun 2024. Faktor pemicu banjir seperti tumpukan sampah di saluran air, alih fungsi sempadan sungai, serta sistem pengendali air hujan, harus diperbaiki. “Sampah harus dibersihkan dan sungai dinormalisasi sebagaimana mestinya,” paparnya. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, di Sidoarjo, Taufiq Hermawan, memperingatkan masyarakat dan pemerintah di Jawa Timur, akan terjadinya bencana tersebut. “Tidak hanya hujan, bahkan petir, angin kencang dan puting beliung, hingga hujan es dimungkinkan terjadi. Puncak hujan diperkirakan akhir Januari hingga Februari dan turun pada akhir Februari,” terangnya, Jumat (3/1/2025). BMKG Juanda selaku koordinator BMKG se-Jawa Timur, telah melakukan operasi modifikasi cuaca atas permintaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk mengurangi intensitas hujan. Operasi dilakukan pada 18 hingga 29 Desember 2024 lalu. “Prioritasnya beberapa daerah yang sudah mengalami banjir, seperti Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, juga di Bojonegoro utara, dan beberapa daerah di selatan seperti Trenggalek.” Antisipasi Bencana di Surabaya. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, Samsul Hariadi, mengatakan telah menyiapkan sarana prasarana mengantisipasi dampak cuaca ekstrem di Kota Surabaya hingga Februari 2025. Satu yang digiatkan adalah pengerukan saluran air tersumbat. Sebanyak 315 pompa air di 77 rumah pompa yang tersebar di seluruh wilayah Surabaya disiapkan. Sementara, Dinas Pemadam Kebakaran menyiagakan 34 armada untuk menyedot genangan air yang lama waktu surutnya. “Terdapat 3 titik yang perlu diwaspadai terkait ancaman banjir rob, yaitu Kalianak, Kali Krembangan, dan Kali Sememi, karena belum memiliki rumah pompa.” Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, Jumat (3/1/2025) mengatakan, perlu rekayasa teknis untuk menangani masalah genangan di Surabaya. “Kondisi geografis Surabaya yang berada di hilir, menjadi tempat bertemunya air dari berbagai daerah di hulu. Khusus banjir rob, terdapat 12 titik yang akan terus dipantau,” paparnya.

9. 08 Desember 2024

**Judul :** Banjir dan Longsor di Sukabumi, BNPB: Pemda dan Masyarakat Harus Sadari Daerah Rawan

**Link :** <https://www.mongabay.co.id/2024/12/08/banjir-dan-longsor-di-sukabumi-bnpb-sadari-hidup-di-daerah-rawan/>



Rahmat, warga Desa Citarik, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, sudah tiga hari tak membuka usaha pangkas rambutnya. Hujan deras mengguyur hampir sepekan menyebabkan banjir bandang di ibu kota Sukabumi itu. “Ini musim hujan paling parah yang pernah terjadi,” kata pria 42 tahun ini kepada *Mongabay* Jumat (6/12/24). Sebelum banjir bandang pada 3 Desember lalu, hujan tanpa reda selama tiga hari beturut-turut. Akibatnya, beberapa sungai yang bermuara ke pantai selatan itu meluber ke jalanan dan menerjang pemukiman warga serta fasilitas umum lain dengan membawa material lumpur. Rata-rata ketinggian air 1-2 meter di hampir semua titik bencana. Dalam video amatir warga merekam arus deras hingga menghanyutkan mobil-mobil warga. “Bahkan ada rumah yang hanyut ke laut,” katanya. “Saya khawatir setelah melihat kondisi begini.” Banjir bandang dan tanah longsor di Sukabumi menyebabkan kerusakan di 29 kecamatan dengan lima korban jiwa, dan tujuh orang masih dalam pencarian. Bencana juga menyebabkan 589 rumah rusak, sebanyak 3.497 jiwa terdampak dan 1.400 orang mengungsi. Kondisi diperburuk dengan akses jalan dan jembatan putus hingga menyulitkan proses evakuasi bencana. Pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat selama tujuh hari ke depan terhitung dari 4 Desember lalu. Pengaruh siklon. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan, khusus 6-8 Desember 2024. Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan, pemicu hujan deras adalah dampak bibit siklon tropis 91S di Samudra Hindia, sebelah barat daya Banten. Bibit siklon tropis ini diperkirakan memberikan dampak terhadap banjir dan longsor meluas di musim hujan. Gejalanya meliputi hujan lebat disertai angin kencang dan petir di beberapa wilayah, termasuk Banten dan Jawa Barat. Kemudian, pada lapisan atmosfer sekitar 3.000 kaki, kecepatan angin dapat mencapai hingga 35 knot atau setara 65 kilometer per jam. Kondisi ini, katanya, mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah bibit siklon tropis, sepanjang daerah konvergensi/konfluensi itu. “Kami mohon masyarakat tak menganggap remeh bibit siklon ini demi keselamatan bersama terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi kibat bibit siklon ini,” katanya dikutip dari laman resmi Kamis (5/12/24). Hasil pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi menyebutkan, Sukabumi masuk dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah-tinggi. Jadi, daerah ini berpotensi terjadi gerakan tanah terutama ketika curah hujan di atas normal. Oktory Prambada, Ketua Tim Gerakan Tanah PVMBG menjelaskan, banyak titik longsor berawal dari lerengan curam tergelincir. Struktur

tanah yang tersusun dari unsur vulkanik itu tidak mampu menampung air. “Penyebabnya banjir yang memicu longsor dimana-mana,” katanya. Oktory mengatakan, Jawa Bagian Selatan, sudah teridentifikasi langganan gerakan tanah ketika peralihan musim. Hampir setiap tahun data rekomendasi kerentanan bencana dari Badan Geologi selalu diperbaharui dan diberikan kepada pemerintah daerah terkait. Kalau dari riwayat bencana berdasarkan zonasi, tekanan risiko meningkat drastis, baik intensitas, frekuensi, sebaran, maupun kekuatannya. Lokasinya pun tak berubah, bahkan ada wilayah jadi langganan. Bila dibandingkan bencana geologi seperti letusan gunung api dan gempa, murni karena faktor alam, ada jejak manusia yang berperan meningkatkan bencana hidrometeorologi. Oktory juga tak memungkiri hal itu karena berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung sudah tak seimbang. “Yang perlu disadari makin meningkatnya risiko, sisi lain kurang direspon dengan daya adaptasi.” Minim pemahaman Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menuturkan, sejak lama Jawa Barat menduduki peringkat pertama bencana di Indonesia termasuk Sukabumi dan Cianjur. Meski begitu, tinggal di daerah dengan riwayat bencana tak berarti diikuti kesadaran meminimalkan dampak. Untuk mengurangi risiko itu, kata Muhari, pemerintah dan masyarakat harus menyadari tempat hidup mereka itu berada di kawasan rawan. Adaptasi jadi kunci menciptakan wilayah tangguh. “Kami selalu memberikan informasi peringatan dini. Memang terjadi setiap tahun tanpa ada perubahan dari sisi penggunaan lahan dan lansekap, dampaknya akan makin tinggi,” katanya. Sebelumnya, BNPB sudah berkoordinasi soal mitigasi bencana dengan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Hasilnya, ada 21 kabupaten dan kota yang menyatakan status darurat bencana. Meski begitu, implementasi kajian pada kebijakan dan tata ruang untuk mitigasi masih jadi tantangan. Ironisnya, ada beberapa daerah belum mengenal risiko kebencanaan di wilayahnya. “Setelah kami intervensi, rata-rata dari kejadian bencana, banyak pemerintah daerah tak tahu soal kerawanan bencana di wilayahnya,” kata Muhari. Padahal, katanya, bencana merupakan urusan wajib layanan dasar sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar. BPNB juga merilis kajian risiko bencana (KRB) dan dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) sebagai rujukan bagi daerah. “Sebetulnya dalam menghadapi bencana sudah banyak rujukan dan aturan tersedia, tinggal *political will* dari pemerintah daerah untuk memampukan daerahnya menghadapi bencana,” kata Muhari. Dia ingatkan, pemerintah daerah lebih memperhatikan tata kelola lingkungan. Selain itu, kekurangan informasi di masyarakat selaras dengan kondisi sosial mereka. Lantaran sudah sering mengalami bencana hingga menyimpulkan rasa aman berlebih. Alhasil, konstruksi sosial ini membuat penanganan bencana menjadi lebih rumit. “Ini memungkinkan masyarakat tak mengambil langkah yang seharusnya. Karena kecenderungan sering mengalami, maka mengurangi daya kritis untuk menyelamatkan diri.” Dia contohkan, warga yang meninggal jadi korban longsor. Sebelumnya, korban sudah mengamankan diri dengan pergi dari rumah. Karena merasa aman, kembali ke rumahnya. Bencana di Sukabumi, memberi perspektif baru bahwa peningkatan partisipasi masyarakat tak bisa ditawar. Masyarakat di lokasi-lokasi rawan bencana tak bisa lagi hanya harap-harap cemas, tetapi perlu berperan aktif merespon ketika peralihan musim. Bagaimana penanganan?

Pada 6 Desember lalu, Letjen TNI Suharyanto, Kepala BNPB memimpin langsung rapat koordinasi (rakor) penanganan darurat bencana di Sukabumi. Dia perintahkan segera aktivasi posko tanggap darurat bencana agar lebih mudah koordinasi dan fungsi komando berjalan. Setidaknya, kata Suharyanto, ada dua posko: posko utama di Pendopo Sukabumi dan posko taktis di Pelabuhan Ratu. Dalam kondisi tanggap darurat, BNPB akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanganan. Apabila situasi mulai kondusif, katanya, lambat laun akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam mengantisipasi bencana susulan, BNPB akan operasi modifikasi cuaca (OMC) di sekitar Sukabumi. “Kami berupaya meminimalisir atau mengurangi debit hujan yang turun di Sukabumi dengan operasi modifikasi cuaca,” kata Suharyanto, dalam rilis BNPB. Sementara Bey Machmudin, Penjabat Gubernur Jawa Barat ketika meninjau lokasi berupaya memperbaiki transportasi baik jalan dan jembatan yang terputus. Pemerintah Jawa Barat menjamin pendistribusian logistik seperti makanan, minuman, dan pakaian berjalan ke daerah-daerah yang terisolasi. Bagi rumah warga yang mengalami pergerakan tanah, dia minta PVMBG untuk analisis demi mengutamakan keselamatan warga. Dia juga memerintahkan normalisasi di beberapa aliran sungai untuk mencegah banjir susulan. BNPB mencatat, ada 1.880 bencana sepanjang 2024 sampai awal Desember 2024. Bencana banjir menjadi paling dominan dengan 938 kejadian.

10. 23 Januari 2025

**Judul :** Kerusakan Lingkungan Picu Banjir dan Longsor di Sumatera?

**Link :** <https://www.mongabay.co.id/2025/01/23/kerusakan-lingkungan-picu-banjir- dan-longsor-di-sumatera/>



Bencana banjir dan longsor dalam Januari ini terjadi di beberapa daerah di Sumatera, seperti di Batam, Kepulauan Riau, Aceh, Sumatera Utara, dan Riau. Kerusakan lingkungan, seperti tutupan hutan terus tergerus jadi salah satu penyebab bencana. Eriawan, Ketua RT004/RW007 Tiban Koperasi, Batam, menangis ketika menceritakan longsor yang menimpa lima rumaharganya. “Maut ini tidak ada yang tahu,” katanya. Insiden di Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau itu meninggalkan trauma mendalam. Apalagi, empat nyawa melayang, termasuk pasangan suami istri Dony Aprianto dan Linda Luciana. Keduanya tertimbun longsor dari bukit setinggi 20 meter di belakang rumah. Lima rumah rusak dan melukai

lima orang. “Tidak ada yang menyangka karena warga sedang tidur,” katanya. Selama 15 tahun tinggal di sana, belum pernah ada kejadian seperti ini. Tetapi, tiba-tiba saja, gundukan bukit itu ambrol saat warga tengah tidur lelap. Peristiwa itu pun membuka kesadaran Eriawan bahwa bukit yang dulu hutan itu jadi kebun pisang dan beton. Padahal, akar-akar dari pohon di hutan itu yang selama ini menjaga bukit dari longsor. “Jadi, karena pohon tak ada, maka tidak ada lagi perekat tanahnya, akhirnya longsor,” kata Eri, sapaannya. Mongabay pun mencoba menelusuri puncak bukit longsor. Terlihat perumahan, berada tak jauh dari titik longsor. Jalanan beraspal di area perumahan, tampak retak-retak yang menandakan wilayah itu kehilangan daya ikat. Hasbi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepri menduga, penghijauan minim jadi penyebab longsor. “Ini jadi pelajaran, mitigasinya harus diperkuat ke depan, misal, pasang batu miring atau penghijauan.” Minim mitigasi Kontur Batam, berupa perbukitan. Banyak rumah dibangun di tepian bukit tanpa mitigasi memadai. Lahan terbatas di Kota Batam juga jadi penyebab, banyak perumahan berada di daerah rawan longsor. Hasbi berharap, BPBD Kota Batam segera terbentuk agar penanganan bencana seperti ini lebih cepat. “Kalau ada BPBD Batam seharusnya kajian risiko bencana dan penanggulangan bisa dilakukan,” katanya seraya bilang akan pendataan daerah rawan bencana di Kota Batam, dan daerah lain. Amsakar Ahmad, Wali Kota Batam terpilih 2025-2029 memastikan pembentukan BPBD tahun ini dan sudah pengesahan perda. Dia pun meminta warga di tepi bukit di perumahan Tiban Koperasi pindah sementara waktu. Ansar Ahmad, Gubernur Kepri berjanji, membicarakan mitigasi bencana dengan para pihak guna meningkatkan kewaspadaan. “BPBD akan menghitung dan pemetaan lokasi-lokasi rawan bencana,” katanya. Data BPBD Kepri, selain Batam, banjir juga terjadi di Kabupaten Bintan dengan 1.083 keluarga terdampak. Begitu juga Tanjungpinang dengan 800 keluarga jadi korban. Beberapa jembatan juga putus. “Banjir rob juga terjadi di beberapa pulau seperti Pulau Karas, Pulau Terong dan lain-lain. Masih pendataan,” kata Hasbi. Endarwin, Direktur Operasi Modifikasi Cuaca BKMG Kepri, mengatakan, cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi hingga sangat tinggi masih akan terjadi hingga Maret-April 2025. “Ini fenomena La-Nina lemah, *madden-julian oscillation* (MJO) dan *cold surge* turut memengaruhi tingginya curah hujan serta gelombang di perairan Kepri. Kondisi ini dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor jika tidak mitigasi dengan baik,” katanya dalam siaran pers Pemerintah Kepri. Widodo Setiyo Pranowo, Peneliti Ahli Utama Bidang Oseanografi Terapan dan Manajemen Pesisir, Pusat Riset Iklim dan Atmosfer (PRIMA), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan, intensitas hujan dipengaruhi fenomena interaksi laut-atmosfer dan Samudera Hindia. “Banjir rob juga terjadi karena angin siklon atau angin kencangnya di laut menyeret permukaan laut jadi gelombang saat kondisi permukaan laut menuju pasang atau persis saat pasang tertinggi pada bulan purnama, maka air laut akan membanjiri masuk ke daratan pantai atau pesisir,” kata pengajar Prodi S2 Oseanografi, Sekolah Tinggi Teknologi TNI Angkatan Laut (STTAL) itu. Bencana ekologis. elain di Kepri, laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB mencatat beberapa bencana itu terjadi di daerah lain di Sumatera. Antara lain, Kabupaten Aceh Timur, banjir merendam 78 rumah warga karena ada luapan sungai di Kecamatan Pante Bidari pada 13 Januari 2025 pukul 07.00. Pasca kejadian, BPBD bersama tim gabungan mengevakuasi warga terdampak ke tempat lebih aman. Di Sumatera Utara, banjir merendam beberapa wilayah antara lain, Kota Binjai dan Medan. Banjir juga merendam Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau. Banjir dipicu hujan deras yang mengakibatkan Sungai Subayang meluap pada 13 Januari lalu. Sebanyak 456 jiwa terdampak dan masih terus pendataan warga terdampak. Melva Harahap, Manager Penanganan dan Pencegahan Bencana Walhi Nasional mengatakan, banjir dan longsor di beberapa daerah di Sumatera buah dari kerusakan lingkungan. “Kalau Walhi menyebut, bencana ekologis itu adalah akumulasi krisis lingkungan,” kata Memeng, sapaan akrabnya. Krisis ekologis itu, seperti perubahan bentang maupun tutupan hutan berkurang karena beralih fungsi. “Jadi, kalau ditanya bencana itu akibat kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan

perubahan iklim, iya betul.” Tata Mustasya, Direktur Eksekutif Sustain (Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia), mengatakan, bencana hidrometeorologi seperti longsor dan banjir memang karena curah hujan tinggi, tetapi itu dampak langsung dari krisis iklim. “Nah, cuaca ekstrem ini akan makin sering terjadi sebagai dampak krisis iklim.” Menurut Tata, ketika cuaca ekstrem ini bertemu persoalan lingkungan lain seperti kekurangan tutupan hutan menyebabkan banjir dan longsor. Menurut dia, ada tiga hal harus dilakukan, *pertama*, mitigasi krisis iklim, terutama percepat transisi energi dari energi fosil ke energi bersih dan terbarukan. *Kedua*, menghentikan deforestasi sebagai bagian dari mitigasi krisis iklim dan menjaga area tangkapan air serta sumber air. *Ketiga*, adaptasi karena cuaca ekstrem seperti kekeringan dan kenaikan permukaan air laut akan terus terjadi dalam beberapa tahun mendatang walaupun sudah mempercepat mitigasi. “Dalam konteks lebih menyeluruh peningkatan kesejahteraan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan karena tidak ada kesejahteraan tanpa kelestarian lingkungan.” Eko Teguh Paripurno, Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, mengatakan, risiko bencana daerah kepulauan lebih besar. Mitigasi pun harus sesuai dengan karakter geologi masing-masing pulau. “Untuk itu, melakukan kajian, kerentanan risiko skala pulau jadi penting, para pihak, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga usaha, dan media bisa mendorong proses kapasitas pengkajian risiko, tentu kajian ancaman kerentanan kapasitasnya perlu mulai dari situ.” Selain kajian, katanya, mitigasi warga sangat penting apalagi daerah itu tak ada BPBD. Pengelola risiko bencana berbasis masyarakat dan komunitas, katanya, jadi kunci. Masyarakat harus paham risiko ketika tinggal di daerah rawan. “Karena itu, membaca karakter longsor jadi penting, biasa berhubungan dengan kemiringan lereng, tingkat pelapukan, beban pemukiman, getaran jalan, itu mesti perlu diperhatikan,” katanya. Terkait banjir, kata Eko, sangat bergantung kepada perubahan permukaan kawasan. Dalam banyak kasus, hujan selalu jadi kambing hitam. Sedangkan perubahan bentang lahan, tak pernah jadi ulasan. “Padahal, tata kelola permukaan jadi mudah menyerap atau tidak itu, satu masalah sendiri yang perlu dikelola dengan baik.”

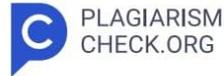
### Lampiran 3. Bukti Bimbingan Tugas Akhir

Rekap Percakapan Bimbingan Syarat Ujian Jadwal Ujian Riwayat Nilai Ujian Nilai Akhir	<table border="1"> <tr> <td>Periode Mulai</td> <td>2024/2025 Genap</td> <td>SKS Lulus</td> <td><b>139 SKS</b></td> </tr> <tr> <td>Tgl. Mulai</td> <td>23 Mei 2025</td> <td>Judul Tugas Akhir</td> <td>PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI PADA MEDIA DARING (Komparasi Framing Pan &amp; Gerald M. Kosicki Antara Media Kompas.com dan Mongabay.co.id pada Periode Agustus 2024 - Februari 2025)</td> </tr> <tr> <td>Tahap</td> <td>Seminar Hasil</td> <td>Status</td> <td>Aktif</td> </tr> </table>	Periode Mulai	2024/2025 Genap	SKS Lulus	<b>139 SKS</b>	Tgl. Mulai	23 Mei 2025	Judul Tugas Akhir	PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI PADA MEDIA DARING (Komparasi Framing Pan & Gerald M. Kosicki Antara Media Kompas.com dan Mongabay.co.id pada Periode Agustus 2024 - Februari 2025)	Tahap	Seminar Hasil	Status	Aktif
Periode Mulai	2024/2025 Genap	SKS Lulus	<b>139 SKS</b>										
Tgl. Mulai	23 Mei 2025	Judul Tugas Akhir	PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI PADA MEDIA DARING (Komparasi Framing Pan & Gerald M. Kosicki Antara Media Kompas.com dan Mongabay.co.id pada Periode Agustus 2024 - Februari 2025)										
Tahap	Seminar Hasil	Status	Aktif										

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	20 Februari 2025	Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom.	Pembahasan Judul Skripsi	✓	
2	5 Maret 2025	Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom.	Mendiskus Bab 1	✓	
3	24 Juni 2025	Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom.	Diskusi Judul dan Bab 1	✓	
4	15 April 2025	Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom.	Bimbingan bab 1 sampai bab 3	✓	
5	13 Juni 2025	Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom.	Bimbingan bab 4	✓	
6	21 Maret 2025	Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom.	Diskusi Judul dan Bab 1	✓	
7	17 Juni 2025	Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom.	Bimbingan bab 4	✓	
8	20 Juni 2025	Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom.	Bimbingan bab 4 dan bab 5	✓	
9	23 Juni 2025	Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom.	Bimbingan bab 1 - bab 5	✓	

## Lampiran 4. Uji Similarity Mandiri



**5.87%**

SIMILARITY OVERALL

SCANNED ON: 12 JUL 2025, 2:08 PM

### Similarity report

Your text is highlighted according to the matched content in the results above.

● IDENTICAL 0.38% ● CHANGED TEXT 5.49% ● QUOTES 0.56%

### Report #27450633

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. 1 12 Latar Belakang Masalah Bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kebakaran hutan merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi di Indonesia.

Jenis bencana ini berdampak signifikan secara sosial, ekonomi maupun ekologis (BMKG, 2024). Khususnya di wilayah Jabodetabek, banjir menjadi bencana tahunan yang kompleks karena dipengaruhi oleh intensitas curah hujan yang tinggi, alih fungsi lahan, serta sistem yang tidak memadai (Kementerian PUPR, 2024). BMKG, 2024 mencatat bahwa sejak awal Agustus 2024 hingga Februari 2025, Indonesia mengalami curah hujan ekstrem yang memicu lonjakan kejadian banjir di Jabodetabek. BNPB (2024) menyebutkan bahwa lebih dari 500.000 warga terdampak banjir di Jabodetabek, dengan kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah. Di tengah eskalasi tersebut, media memainkan peran strategis tidak hanya dalam menyampaikan informasi, tetapi juga dalam membentuk persepsi publik, membingkai penyebab, dan mengarahkan narasi kebijakan terkait mitigasi bencana.

Gambar 1.1. Pemberitaan tentang Bencana Alam Banjir di Media Daring Sumber : Kompas.com dan Mongabay.co.id 2 Penelitian ini membandingkan pemberitaan bencana Hidrometeorologi di dua media dengan mengkritisi dan informasi pendekatan berbeda : Media Kompas.com dan Media Mongabay.co.id Artikel Media Kompas.com

## Lampiran 5. Curriculum Vitae

# AVIRA PRETY PRATIWI

MAHASISWA



## PROFIL

Halo! Nama saya Avira, dan saya adalah mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi minor Broadcasting Journalism di Universitas Pembangunan Jaya. Saya mempunyai skill berbisnis dan bersemangat untuk memulai karir saya di industri media dan berkontribusi positif pada tim yang dinamis. Seorang pembelajar yang cepat dengan keterampilan komunikasi yang sangat baik dan semangat untuk memecahkan masalah yang kompleks

## PENDIDIKAN

**2021 - Sekarang**  
**Ilmu Komunikasi -  
Broadcasting Journalism**  
Universitas Pembangunan Jaya

## HOBİ



Berenang



Berpergian

## PENGALAMAN

### Februari 2024 - Sekarang

*Panitia Acara CORE - Event & Operation*  
Universitas Pembangunan Jaya

- Membuat rangkaian acara yang akan dilaksanakan
- Mengerjakan Jobdesc yang sesuai

### April 2024

*Volunteer Merangkai Bunga*  
Kejar Mimpi Tangerang Selatan

- Memberikan peserta kepuasan dan berhasil untuk merangkai bunga

### 2021 - 2023

*Driver Ojek Online*

Shopee Driver

- Memberikan pelayanan dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan berhasil mendapat rating 4,8/5.
- Menjadi garda terdepan dan perwakilan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan lewat penyampaian informasi dengan jelas terkait waktu pengantaran dan biaya.

## KEAHLIAN

- Microsoft Office
- Canva
- Team Work
- Marketing

 0896-3183-7473

 avirapretypratiwi@gmail.com

 Kota Tangerang Selatan, Banten

## Lampiran 6. Sertifikat Prima UPJ 2021



The certificate features a dark background with a white torn-paper effect on the left side. In the top left corner, there is a red and yellow sticker that reads "PRIMA 2021" and "AUG'21". In the top right corner, there are three logos: the logo of Universitas Padjadjaran (UPJ), the PRIMA 2021 logo, and the BEM logo. Below the logos, the word "SERTIFIKAT" is written in bold, followed by the number "035/BEM-PRIMA/UPJ.09.21" and a large, stylized letter "D".

Diberikan Kepada:

**Avira Prety Pratiwi**

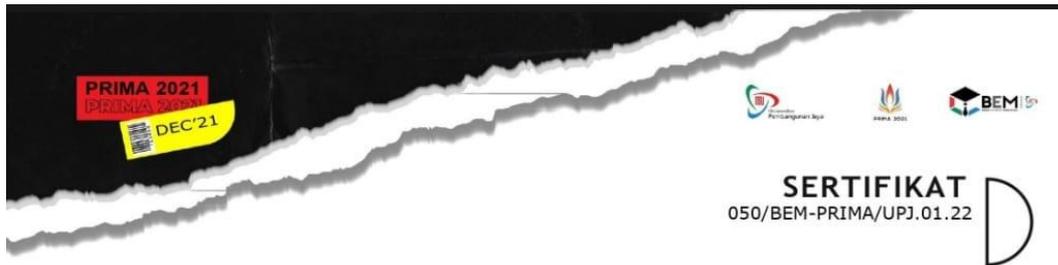
Terima kasih atas kontribusinya sebagai **PESERTA** pada kegiatan **PRIMA UPJ 2021** yang dilaksanakan secara online pada tanggal 02 - 24 Agustus 2021.

Pendamping PRIMA 2021  
  
Fauzah Joko, S.Kom

Ketua Pelaksana PRIMA 2021  
  
Talitha Marcella

 EXPRESS YOURSELF THROUGH CREATIVITY

## Lampiran 7. Sertifikat PRIMA Lanjutan 1

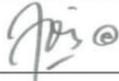


Diberikan Kepada:

**Avira Prety Pratiwi**

Terima kasih atas kontribusinya sebagai **Peserta** pada acara PRIMA UPJ 2021 "**PRIMA Lanjutan 1**" yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2021

Pendamping PRIMA 2021



Fauzah Joko, S.Kom

Ketua Pelaksana PRIMA 2021



Talitha Marcella



## Lampiran 8. Sertifikat PRIMA Lanjutan 2

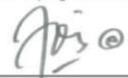


**SERTIFIKAT**  
051/BEM-PRIMA/UPJ.01.22

Diberikan Kepada:

**Avira Prety Pratiwi**

Terima kasih atas kontribusinya sebagai **Peserta** pada acara PRIMA UPJ 2021 "**PRIMA Lanjutan 2**" yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2022.

Pendamping PRIMA 2021  
  
Fauzah Joko, S.Kom

Ketua Pelaksana PRIMA 2021  
  
Talitha Marcella



## Lampiran 9. Sertifikat LDK



## Lampiran 10. Formulir Pengajuan Skripsi

	<b>FORMULIR PENGAJUAN SKRIPSI/TA</b>	SPT-I/03/SOP-28/F-01
		No. Rekaman

**Nama Mahasiswa** : Avira Prety Pratiwi  
**Prodi/NIM** : Ilmu Komunikasi / 2021041019  
**Judul Skripsi/TA yang diajukan** : PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN BENCANA ALAM  
 (disusun dalam kalimat singkat, HIDROMETEOROLOGI PADA MEDIA DARING (Komparasi  
 padat, jelas dan menarik minat (Komparasi Framing Pan & Gerald M Kosicki Antara Media  
 pembaca) Kompas.com dan Mongabay.co.id Pada Periode Agustus 2024 –  
 Februari 2025

Telah memenuhi syarat pengajuan Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	Jumlah sks lulus (sesuai ketentuan Prodi)	v	
2	Mata kuliah prasyarat (sesuai ketentuan Prodi)	v	
3	IPK minimal 2,00	v	
4	Tidak sedang terkena sanksi akademik/sanksi lainnya	v	
5	Poin JSDP (sesuai ketentuan Prodi)	v	
6	Mengumpulkan Proposal Skripsi (sesuai ketentuan Prodi)	v	
7	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	v	

Tangerang Selatan, Selasa 25 Maret 2025

Mengajukan,	Menyetujui,	Mengetahui,
		
(Avira Prety Pratiwi) Mahasiswa	Reni Dyanasari, S.I.Kom., M.Si. Dosen PA	Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom. Kaprodi

## Lampiran 11. Formulir Persetujuan Penulisan Skripsi

 Universitas Pembangunan Jaya	<b>FORMULIR PERSETUJUAN PENULISAN                  SKRIPSI/TA</b>	SPT-I/03/SOP-28/F-02
		No. Rekaman

Nama Mahasiswa : Avira Prety Pratiwi  
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2021041113  
 Judul Skripsi/TA : PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN BENCANA ALAM  
 diajukan HIDROMETEOROLOGI PADA MEDIA NASIONAL DAN MEDIA  
 LINGKUNGAN (Komparasi Framing Pan & Gerald M Kosicki  
 Antara Media Kompas.com Dan Mongabay.co.id Pada Periode  
 Agustus 2024 – Februari 2025)

Telah disetujui untuk menulis Skripsi/TA.

Dosen Pembimbing Skripsi/TA yang ditugaskan Prodi adalah:

No	Nama	NIDN	JAD
1	Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom.	0407029501	Lektor

Tangerang Selatan, 19 Mei 2025

Menugaskan,	Menyetujui,	Menerima,
		
Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom., C.Ht.	Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom.

## Lampiran 12. Formulir Pembimbingan Skripsi

	<b>FORMULIR PEMBIMBINGAN SKRIPSI/TA</b>	SPT-I/03/SOP-28/F-03
		No. Rekaman

Nama Mahasiswa : Avira Prety Pratiwi  
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2021041113  
 Judul Skripsi/TA yang diajukan : PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN BENCANA ALAM  
 HIDROMETEOROLOGI PADA MEDIA NASIONAL DAN MEDIA  
 LINGKUNGAN (Komparasi Framing Pan & Gerald M. Kosicki Antara  
 Media Kompas.com dan Mongabay.co.id Pada Periode Agustus 2024  
 -Februari 2025)

No	Tanggal	Materi Pembimbingan	Paraf Mhs	Paraf Dosen Pembimbing
1	20 Februari 2025	Pembahasan Judul Skripsi : Menentukan judul skripsi yang mau di ambil yang sudah disarankan dan dijelaskan tentang metode, sumber, dan indikator/pedoman wawancara untuk proposal skripsi.		
2	5 Maret 2025	Diskusi Bab 1 : Membahas isi bab 1 dan mengganti judul serta metode penelitian		
3	21 Maret 2025	Diskusi Judul dan Bab 1 : Pertemuan ke-3 yang membahas judul baru dan diskusi bab 1 serta diberikan arahan untuk lanjut bab 2 dan bab 3.		
4	15 April 2025	Bimbingan Bab 1 sampai Bab 3 : Membahas hasil kerja bab 1 sampai bab 3 dan memberi tahu apa yang harus di revisi.		
5	13 Juni 2025	Bimbingan Bab 4 : Membahas bab 4 bagian 10 berita dari satu media nasional.		
6	17 Juni 2025	Bimbingan Bab 4 : Membahas bab 4 bagian 10 berita dari satu media lingkungan.		
7	20 Juni 2025	Bimbingan Bab 4 dan Bab 5 : Membahas bab 4 dan tabel perbandingan antara dua media.		
8	23 Juni 2025	Bimbingan Bab 1 – Bab 5 : Bimbingan yang membahas bab 1 sampai bab 5 serta revisian hingga selesai.		

\* Jika pembimbingan lebih dari minimal 8 kali, mohon membuat salinan formulir ini

	
Avira Prety Pratiwi Mahasiswa	Fathiyah Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom. Dosen Pembimbing 1

### Lampiran 13. Formulir Pengajuan Sidang Skripsi

	<b>FORMULIR PENGAJUAN SIDANG SKRIPSI/TA</b>	SPT-I/04/SOP-06/F-01
		No. Rekaman

Nama Mahasiswa : Avira Prety Pratiwi  
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2021041113  
 Judul Skripsi/TA : PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI  
 PADA MEDIA NASIONAL DAN MEDIA LINGKUNGAN (Komparasi Framing Pan & Gerald M. Kosicki Antara Media Kompas.com Dan Mongabay.co.id Pada Periode Agustus 2024 – Februari 2025)  
 Dosen Pembimbing : 1. Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom.  
 Dosen Penguji : 1. \_\_\_\_\_  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_  
 Jadwal Sidang : Tempat : \_\_\_\_\_ Hari/Tanggal : \_\_\_\_\_

Telah memenuhi syarat Sidang Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	IPK minimal 2.00	V	
2	Tidak ada nilai D untuk mata kuliah mayor/inti Prodi	V	
3	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	V	
4	Lulus minimal 1 mata kuliah KOTA untuk tiap rumpun	V	
5	SPT-I/03/SOP-28/F-03 Formulir Pembimbingan Skripsi (minimal 8 x)	V	
6	Poin JSDP (minimal 75% persen dari syarat kelulusan)	V	
7	Mengumpulkan dokumen Skripsi/TA (sesuai ketentuan Prodi)	V	

Tangerang Selatan, 24 Juni 2025

Mengajukan	Mengetahui	Memeriksa	Menyetujui
			
Avira Prety Pratiwi Mahasiswa	Fathiya Nur Rahmi, S.I.Kom, M.I.Kom. Dosen Pembimbing	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si. Koordinator Skripsi/TA	Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom., C.Ht. Kaprodi